

ANNUAL REPORT



2025



(022) 5410733
corporate@bprhaldenprime.com
Jl. Terusan Kopo No. 456 D
Margahayu Kab. Bandung

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Ikhtisar Utama	<i>ii</i>
I. Laporan Manajemen	1
Laporan Direksi	1
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	6
II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif	12
III. Kepemilikan	18
IV. Perkembangan Usaha	19
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen	24
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	36
VII. Laporan Keuangan Tahunan	40
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	49
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	50

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2025 ini merupakan laporan komprehensif yang menyajikan kinerja PT BPR Halden Prime selama periode 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan ini memuat Laporan Keuangan Tahunan serta informasi umum Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi industri perbankan, termasuk bagi PT BPR Halden Prime. Namun demikian, PT BPR Halden Prime mampu melalui periode tersebut dengan cukup baik dan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun 2024.

Dalam merespons berbagai tantangan dan dinamika perubahan, Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Selain itu, PT BPR Halden Prime juga terus mendorong inovasi, efisiensi operasional, serta memperkuat kolaborasi di seluruh lini organisasi guna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan.

Seluruh langkah strategis yang ditempuh diarahkan untuk mengoptimalkan peluang yang ada, mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan PT BPR Halden Prime.

PT BPR HALDEN PRIME

Laporan Ikhtisar Data Keuangan 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kredit yang Diberikan	Rp 101.313.993.575
Pendapatan Operasional	Rp 11.151.324.721
Beban Operasional	Rp 10.649.149.976
Pendapatan Non Operasional	Rp 41.337.977
Beban Non Operasional	Rp 187.714.171
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp 289.883.437

Rasio Keuangan

KPMM

20,37%

NPL Neto

2,63%

NPL Gross

2,80%

ROA

0,58%

BOPO

95,50%

NIM

12,85%

LDR

120,44%

Cash Ratio

6,84%

I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga BPR Halden Prime berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi BPR Halden Prime Menjadi BPR yang Kuat, Sehat, serta melindungi kepentingan seluruh stakeholder, Menerapkan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance), Menuju terwujudnya BPR yang tumbuh dan berkembang, kuat, sehat, serta memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham, nasabah, mitra dan karyawan, Menuju BPR yang selalu berinovasi di era digitalisasi.

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Sepanjang 2025, BPR Halden Prime tetap optimis namun berhati-hati dalam meningkatkan portofolio pinjaman sejalan dengan dinamika lingkungan usaha. Kami senantiasa disiplin dalam melakukan ekspansi kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

Dalam mendukung pertumbuhan, BPR Halden Prime juga memperkuat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui peningkatan kepuasan nasabah, keunggulan dan inovasi produk dan optimalisasi program marketing dana. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi di bidang pemasaran dan analisis kredit, layanan prima serta manajemen risiko. BPR Halden Prime terus memperkuat penerapan tata kelola (GCG), kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan pemahaman terhadap model bisnis calon debitur yang hendak diakuisisi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha BPR Halden Prime tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan strategis BPR Halden Prime pada tahun 2025 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang berkualitas (*quality growth*), memperluas basis nasabah dan penetrasi pasar secara selektif, menjaga rasio kredit bermasalah pada level yang terkendali, peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi, serta penguatan daya saing melalui inovasi produk dan layanan prima. BPR Halden Prime juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator.

Direksi memainkan peran sentral dalam membentuk strategi dan kebijakan BPR Halden Prime untuk memastikan keselarasan dengan Visi dan Misi Bank. Direksi menetapkan arah strategis

yang jelas dan berkolaborasi dengan semua unit bisnis untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, serta didukung oleh perangkat pendukung utama seperti kepegawaian, teknologi, infrastruktur, dan manajemen risiko.

Untuk mendorong pelaksanaan yang efektif, Direksi menetapkan target yang terukur dan tercermin pada indikator kinerja utama (KPI - *Key Performance Indicator*) serta memastikan keselarasan pelaksanaan inisiatif di seluruh unit bisnis. Implementasi strategi dipantau melalui monitoring berkala dan komunikasi berkelanjutan dengan unit kerja bisnis, fungsi pendukung, cabang, dan kantor kas. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar. Direksi juga mendorong budaya dan nilai-nilai perusahaan untuk memperkuat kerja sama tim dan memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang efektif.

Pada tahun 2025, total portofolio pinjaman tumbuh sebesar 186,36% dari tahun 2024, secara tahunan mencapai Rp 101.313.993.575,-. Kami optimis bahwa pertumbuhan kredit dan skala usaha BPR Halden Prime dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi yang tepat sasaran melalui eksekusi bisnis yang disiplin.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT BPR Halden Prime menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) sebesar **0,58%** dan *Return on Equity* (ROE) sebesar **4,80%**. Pertumbuhan kredit relatif tinggi sebesar 186,36% secara tahunan dengan kualitas kredit yang relatif baik yang ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* sebesar **2,80%**. Dari sisi efisiensi operasional, BPR Halden Prime berhasil mengendalikan biaya dengan baik, sebagaimana tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar **95,50%**.

Pada akhir tahun 2025, PT BPR Halden Prime juga berhasil memenuhi dan melampaui sebagian besar target keuangan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kinerja manajemen yang solid dalam mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, serta kemampuan BPR Halden Prime beradaptasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Target Vs Realisasi

Indikator Keuangan	Target 2025	Realisasi
Pertumbuhan Kredit	88,32%	186,36%
NPL (<i>Gross</i>)	3,88%	2,80%
NPL (<i>Net</i>)	3,68%	2,63%
BOPO	94,03%	95,50%
<i>Return on Asset</i> (ROA)	0,93%	0,58%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	6,65%	4,88%

Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang tahun 2025, BPR Halden Prime masih menghadapi dinamika perekonomian global, domestik dan regional yang ditandai oleh ketidakpastian kebijakan moneter, serta meningkatnya persaingan likuiditas dan iklim usaha yang belum kondusif. Dalam kondisi tersebut, BPR Halden Prime memfokuskan strategi penyaluran kredit pada pertumbuhan yang berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, serta optimalisasi kapabilitas yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPR Halden Prime menjalankan beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan *end-to-end credit process* dengan melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses kredit dari awal sampai selesai, mulai dari calon debitur mengajukan pinjaman hingga kredit tersebut lunas atau ditutup. Untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit melalui penguatan manajemen risiko dan penerapan disiplin risiko yang konsisten di seluruh segmen.
2. Meningkatkan kualitas kredit eksisting dengan melakukan monitoring kredit yang ketat serta melakukan penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
3. Meningkatkan marketing funding untuk pertumbuhan DPK dalam rangka menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM (*Net Interest Margin*) serta memperkuat likuiditas BPR Halden Prime.
4. Pengembangan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pegawai dan direksi mengikuti pelatihan teknis perbankan dan seminar yang relevan dengan ekonomi dan perbankan.
5. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola dengan memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat fungsi pengawasan internal.

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2025 BPR Halden Prime menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara efektif dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Perseroan, sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen guna memastikan kebijakan dan strategi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mendukung hal tersebut, BPR Halden Prime juga memperkuat fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil *Self Assessment* terhadap 12 Faktor Penerapan Tata Kelola berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik). Hal ini menunjukkan Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum

kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Halden Prime berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR Halden Prime menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Penerapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan ketentuan regulator.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk mendukung hal tersebut, BPR Halden Prime juga memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk melalui penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) serta pemantauan profil risiko secara berkala.

Hasil Penilaian Profil Risiko pada Semester II 2025 menunjukkan bahwa Profil Risiko BPR Halden Prime termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, BPR Halden Prime

Apresiasi dan Penutup

Direksi BPR Halden Prime menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan BPR Halden Prime untuk terus tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja

kerasnya, yang memungkinkan BPR Halden Prime untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT BPR Halden Prime, untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. BPR Halden Prime berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif, BPR Halden Prime mampu menjaga ketahanan kinerja dan stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi serta pengelolaan risiko yang prudent.

Laporan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan beserta pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha BPR Halden Prime; serta pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja struktur organ tata kelola.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi, antara lain:

1. Pengawasan atas Kinerja Direksi dengan memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), mengevaluasi pencapaian kinerja keuangan dan operasional dan memberikan arahan strategis dalam pengembangan usaha
2. Pengawasan atas Penerapan Tata Kelola (GCG) dengan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta menilai efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko
3. Pengawasan Manajemen Risiko dengan mengawasi implementasi manajemen risiko, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan serta mengevaluasi laporan profil risiko BPR Halden Prime secara berkala
4. Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal termasuk Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank, menilai kecukupan sistem pengendalian internal (*internal control*) dan mengawasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal telah diselesaikan secara tuntas
5. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan pemenuhan kepatuhan (*comply with*) menyampaikan pelaporan terhadap seluruh ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penyelesaian seluruh komitmen yang dibuat BPR dengan regulator.

Frekuensi dan Mekanisme Rapat

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris PT BPR Halden Prime telah melaksanakan rapat secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.

Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda yang mencakup antara lain evaluasi kinerja, pembahasan strategi

bisnis, pengawasan penerapan tata kelola, serta pemantauan profil risiko Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan rapat sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang tinggi, terselenggaranya rapat secara rutin dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan agenda yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Perseroan, Tercapainya pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berkualitas, adanya tindak lanjut yang memadai atas setiap rekomendasi dan hasil rapat

Dengan demikian, rapat Dewan Komisaris telah berfungsi secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT BPR Halden Prime.

Agenda rapat meliputi:

1. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional
2. Pembahasan laporan audit
3. Pemantauan risiko dan kepatuhan
4. Persetujuan kebijakan strategis tertentu

Rekomendasi kepada Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas kredit dan penurunan NPL
2. Penguatan sistem pengendalian internal
3. Peningkatan kualitas SDM dan kompetensi
4. Penguatan infrastruktur teknologi informasi
5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

Penilaian atas Kinerja Direksi

Hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi dituangkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi, baik secara individu maupun kolegal, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT BPR Halden Prime secara baik, serta menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti saran dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Upaya tersebut tercermin dalam kinerja perusahaan yang tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Direksi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank secara optimal, di tengah

kondisi perekonomian yang masih diwarnai oleh ketidakpastian, baik secara nasional maupun regional.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kinerja melalui penguatan strategi bisnis, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, serta optimalisasi peluang pertumbuhan yang ada, guna memastikan keberlanjutan usaha PT BPR Halden Prime.

Penilaian dan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Prospek Bisnis

Dewan Komisaris memandang prospek usaha BPR ke depan cukup menantang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan regional yang belum tumbuh secara signifikan dan masih perlu fokus pada penjualan kredit yang berkualitas, perbaikan kolektibilitas kredit, peningkatan DPK, peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan permodalan secara organik.

Dewan Komisaris memberikan dukungan terhadap prospek bisnis tahun 2026 yang disampaikan oleh Direksi, yang dinilai telah mencerminkan pendekatan yang seimbang antara optimalisasi peluang usaha dan penerapan mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris juga mendukung kebijakan Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi senantiasa menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang, serta untuk memastikan keberlangsungan usaha Bank secara sehat dan berkelanjutan.

Pengawasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Salah satu tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha BPR Halden Prime di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan (*trust*) dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/ atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atas 12 Faktor Tata Kelola posisi 31 Desember 2025, BPR Halden Prime memiliki Peringkat Komposit 2 (Baik) dan Peringkat Komposit (PK) ini agar dipertahankan atau dapat ditingkatkan menjadi PK-1 (Sangat Baik).

Pengawasan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

Mengacu pada POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank pada Pasal 9 ayat (1) dan (3) dengan substansi bahwa Dewan Komisaris BPR wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris BPR dimaksud dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (P2RBB) secara semesteran sesuai dengan POJK mengenai RBB BPR dan BPRS.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menyajikan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
2. Sesuai dengan Laporan Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan (PIPku) Bank tahun 2025 yang diterima oleh Dewan Komisaris yang berisi tentang: a. Hasil Penilaian Sendiri Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPku) yang dilakukan oleh Direksi dengan Peringkat 2 (Memadai) dan b. Laporan Hasil Pengujian atas Pos-Pos Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2025 yang telah disiapkan oleh Unit atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank ,
3. Maka Dewan Komisaris memastikan bahwa BPR telah melaksanakan pengendalian internal yang efektif dalam proses pelaporan Keuangan Bank pada tahun 2025;
4. Tidak terdapat tindakan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan atau pihak lain;
5. Tidak terdapat penekanan atau intervensi ke Bank dari pihak manapun yang menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/ atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Pengawasan Penerapan Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan:

1. mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris;
2. memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan;
3. memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk pemenuhan komitmen kepada otoritas.

Pengawasan Penerapan Program APU PPPT dan PPPSPM

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) merupakan program yang wajib diterapkan dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*) yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 14 Juni 2023.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan program APU PPT dan PPPSPM di BPR Halden Prime telah berjalan dengan baik dengan melaksanakan upaya pencegahan dan memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) sebagai sarana melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara operasional dalam penerapannya, Unit Kerja dan seluruh tingkatan pegawai pada BPR telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM.

Berdasarkan *Self Assessment* terhadap Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM atau Laporan IRA (*Individual Risk Assessment*) posisi 31 Desember 2025 yang dilaporkan ke OJK dan Laporan IRA dimaksud ditembuskan ke Dewan Komisaris, menunjukkan bahwa Tingkat Risiko PT BPR Halden Prime berada pada Peringkat Rendah (1) dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan BPR, kemungkinan risiko TPPU, TPPU dan PPPSPM yang dihadapi PT BPR Halden Prime dari Risiko inheren rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. KPPA (Kualitas Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM) PT BPR Halden Prime memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Pengawasan Penerapan Strategi Anti Fraud

Mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* (SAF) Bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT BPR Halden Prime selaku Lembaga Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki Standar Prosedur Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud yang mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024. SOP tersebut merupakan wujud komitmen manajemen PT BPR Halden Prime dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BPR Halden Prime dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/ nasihat kepada Direksi agar:

1. Seluruh Kepala Unit Kerja agar senantiasa menerapkan fungsi pengawasan/kontrol (mulai dari *maker*, *checker* sampai dengan *approval*) secara ketat dan penuh tanggung jawab sebagai upaya meningkatkan pengendalian internal untuk menjaga BPR Halden Prime agar tidak terjadi *fraud* baru sesuai prinsip "*Zero Tolerance*", yang berdampak pada penilaian KPI per Individu.
- 2.

Sosialisasi dan peningkatan risk awareness untuk mencegah agar tidak terjadi potensi risiko Fraud. BPR agar berkomitmen untuk melakukan sosialisasi atau kampanye kesadaran mengenai anti fraud, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui penyelenggaraan dan pertemuan rutin di internal pegawai minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Penutup Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Halden Prime menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah ditunjukkan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan secara independen dan objektif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga akan senantiasa memperkuat sinergi dengan Direksi dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan.

II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

Daftar Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1.	
Nama	IQBAL FEBRIANO
Alamat	JL. JOHAR BARU IV-A NO. 2 RT. 016 RW. 005 KEL. JOHAR BARU KEC. JOHAR BARU KOTA JAKARTA PUSAT PROV DKI JAKARTA
Jabatan	Komisaris Utama
Tanggal Mulai Menjabat	06 September 2023
Tanggal Selesai Menjabat	06 September 2028
Nomor SK Persetujuan Otoritas	SR-105/KR.0221/2023
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	06 September 2023
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	11 Mei 2015
Nama Lembaga Pendidikan	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMISARIS BPR
Tanggal Pelatihan	20 Juni 2023
Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 Juni 2028

2.



Nama	FAIZAL SANUSI
Alamat	Jl. Kamp Irian RT. 010 RW. 006 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat
Jabatan	Komisaris
Tanggal Mulai Menjabat	12 Desember 2025
Tanggal Selesai Menjabat	12 Desember 2030
Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-126/KR.12/2025
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	12 Desember 2025
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	26 Oktober 1999
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS INDONESIA
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMISARIS BPR
Tanggal Pelatihan	22 April 2024
Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	22 April 2027

3.



Nama	INDRIANTI SUKARMADIJAYA
Alamat	SETRA REGENCY BLOK B 38 A RT 004 RW 002 KEL. CIWARUGA KEC. PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal Mulai Menjabat	02 Februari 2022
Tanggal Selesai Menjabat	02 Februari 2027
Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-12/KR.02/2022
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	19 Januari 2022
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	19 Desember 1997
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI DIREKTUR BPR TINGKAT 1
Tanggal Pelatihan	13 Oktober 2021
Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 Desember 2026

4.



Nama	FITRA RAMDANI, ST
Alamat	JL. WINAYA UTAMA NO. 54 RT. 004 RW. 010 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA
Jabatan	Direktur
Tanggal Mulai Menjabat	15 September 2025
Tanggal Selesai Menjabat	15 September 2030
Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-95/KR.12/2025
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	15 September 2025
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	12 September 2007
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS PASUNDAN
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI DIREKTUR BPR TINGKAT 1
Tanggal Pelatihan	28 Juni 2025
Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI CERTIF
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	28 Juli 2028

2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	FARID KOMARUDIN
	Alamat	JL. CISARANTEN KULON IX NO. 41A RT. 008 RW. 005 KEL. CISARANTEN KULON KEC. ARCAMANIK KOTA BANDUNG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Agustus 2023
	Surat Pengangkatan No.	017/BPR-DP/DIR/SK/VII/2023
	Surat Pengangkatan Tanggal	25 Juli 2023
	2.	Nama
Alamat		KP. SINDANGRERET RT. 001 RW. 001 DS. CIKUPA KEC. KARANGNUNGGAL KAB. TASIKMALAYA
Jabatan		Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif APU dan PPT
Tanggal Mulai Menjabat		23 Agustus 2023
Surat Pengangkatan No.		020/BPR-DP/DIR/SK/VIII/2023
Surat Pengangkatan Tanggal		15 Agustus 2023
3.		Nama
	Alamat	Jl. Cimandiri No 20 RT 002 RW 007, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	02 Oktober 2024
	Surat Pengangkatan No.	021/SK-DIR-PERSO/BPR-DUPAS
	Surat Pengangkatan Tanggal	02 Oktober 2024

4.	Nama	DWI GUSTIN CATURANI
	Alamat	JALAN GIRI MEKAR MANIS RAYA NO D-18 RT 003 RW 021, KEL. GIRIMEKAR, KEC. CILENGKRANG, KABUPATEN BANDUNG
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	02 Desember 2025
	Surat Pengangkatan No.	05/SK-DIR-SDM/BPR-HP/XII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	01 Desember 2025
	5.	Nama
Alamat		KOMP. GBA 1 BLOK C NO 181 RT 005 RW 013, KEL BOJONGSOANG, KEC BOJONGSOANG, KAB BANDUNG
Jabatan		Pejabat Eksekutif Audit Intern
Tanggal Mulai Menjabat		02 Desember 2025
Surat Pengangkatan No.		020/SK-DIR-PERS/BPR-DP/X/24
Surat Pengangkatan Tanggal		02 Oktober 2024

III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	HAFIDZ ARY NURHADI
	Alamat	Jl. Jatimulya RT. 07 RW. 11 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp19933800000
	Persentase Kepemilikan	99.05%
	2.	Nama
Alamat		JL. Johar Baru IV-A No.2 RT 016 RW 005 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru
Jenis Pemilik		Perorangan
Status Pemegang Saham		Non PSP
Jumlah Nominal		Rp191200000
Persentase Kepemilikan		0.95%

Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	HAFIDZ ARY NURHADI
2.	Nama Ultimate Shareholder	IQBAL FEBRIANO

IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	7
Tanggal akta pendirian	26 Mei 1992
Tanggal mulai beroperasi	28 Mei 2002
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	01
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	17 September 2025
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-0031508.AH.01.02.Tahun 2025
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	18 September 2025
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Deposito dan Tabungan. Menyalurkan kembali dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.
Tempat kedudukan	Kabupaten Bandung
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	02. Wajar Dengan Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Sabar dan Rekan

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	11.151.325
Beban Operasional	10.649.150
Pendapatan Non Operasional	41.338
Beban Non Operasional	187.714
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	355.799
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	0
Beban Pajak Tangguan	65.915
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	289.883

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	13.255.792	-	-	-	100.000	13.355.792
Kredit yang Diberikan	-	-	-	-	-	-
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	435.622	-	-	-	-	435.622

d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	85.103.259	12.940.018	1.791.321	136.125	907.649	100.878.372
---	------------	------------	-----------	---------	---------	-------------

Jumlah Aset Produktif	98.794.672	12.940.018	1.791.321	136.125	907.649	114.669.785
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	--------------------

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,37
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100
NPL Neto	2,63
NPL Gross	2,80
Return on Assets (ROA)	0,58
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,50
Net Interest Margin (NIM)	12,85
Loan to Deposit Ratio (LDR)	120,44
Cash Ratio	6,84

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	2,80
NPL Neto (%)	2,63

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Peningkatan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah disebabkan oleh penurunan pendapatan debitur, penjualan Property terhambat (penjualan ke enduser menurun), serta kurangnya iktikad baik untuk membayar.

Langkah Penyelesaian:

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan pada semester ini atas permasalahan yang terjadi adalah menekan pertumbuhan kredit bermasalah dengan melakukan proses penyelesaian kredit NPL seperti melakukan take over ke bank lain dan penjualan agunan debitur agar dapat dilakukan pelunasan.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Sepanjang tahun 2025, terjadi pertumbuhan kinerja yang signifikan, terutama dalam peningkatan aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, aset meningkat sebesar 267,97%, tabungan naik 270,82%, deposito naik 315,71%, dan kredit mengalami lonjakan sebesar 286,36%.

Sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit, pendapatan bunga BPR pada tahun 2025 juga meningkat sebesar 234,40%. Dari sisi biaya, terjadi kenaikan sebesar 150,37% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan terbesar pada biaya bunga yang disebabkan oleh pertumbuhan penghimpunan tabungan dan deposito.

Perubahan Penting Lain

Pada tahun 2025, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 22 April 2025 diberikan persetujuan terkait perubahan nama perseroan dari PT BPR Bank Duta Pasundan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime.

Selanjutnya, pada tanggal 08 September 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) diberikan persetujuan atas penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Bapak Hafidz Ary Nurhadi.

Berdasarkan salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime Nomor 01 Tanggal 17 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Laty Gayanti, SH terdapat perubahan susuna kepengurusan dan diberikan persetujuan atas penambahan modal disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Bapak Hafidz Ary Nurhadi, sehingga komposisi kepemilikan saham BPR menjadi :

No	Nama Pemilik Saham	Sebelum Penambahan			Penambahan		Setelah Penambahan		
		Saham	Nominal (Rp.)	%	Saham	Nominal (Rp.)	Saham	Nominal (Rp.)	%
1	Hafidz Ary Nurhadi	189.338	18.933.800.000	99,00	10.000	1.000.000.000	199.338	19.933.800.000	99,05
2	Iqbal Febriano	1.912	191.200.000	1,00			1.912	191.200.000	0,95
	Jumlah	191.250	19.125.000.000	100,00	10.000	1.000.000.000	201.250	20.125.000.000	100,00

dan susunan pengurus perseroan menjadi :

NO	JABATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
	<u>Dewan Komisaris</u>		
1.	Komisaris Utama	IQBAL FEBRIANO	IQBAL FEBRIANO
2.	Komisaris	-	FAIZAL SANUSI
	<u>Direksi</u>		
1.	Direktur Utama	INDRIANTI SUKARMADIJAYA	INDRIANTI SUKARMADIJAYA
2.	Direktur Bisnis	-	FITRA RAMDANI

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekonomian

Tinjauan Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif **cukup stabil**, meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga pada kisaran **±5%**, dengan realisasi tahun 2025 sekitar 5,1% dan proyeksi tahun 2026 berada pada rentang **4,9%–5,7%**.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh **konsumsi rumah tangga dan investasi** yang tetap kuat. Peningkatan daya beli masyarakat, dukungan belanja pemerintah, serta berbagai program stimulus dan bantuan sosial turut memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi industri perbankan, termasuk BPR Halden Prime, kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan kredit diproyeksikan dapat meningkat, sejalan dengan pemulihan sektor riil. Namun di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan kualitas aset di tengah ketidakpastian global yang berimbas ke perekonomian nasional dan di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah-langkah tersebut penting diambil oleh BPR Halden Prime untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Pencapaian tujuan perusahaan tidak saja diukur oleh parameter-parameter yang bersifat kuantitatif, seperti pertumbuhan kinerja keuangan, namun juga diukur oleh pencapaian kinerja yang bersifat kualitatif seperti kemampuan manajemen dalam menjaga dan meningkatkan citra dan nilai perusahaan bagi segenap stakeholder. Sepanjang tahun 2025 BPR Halden Prime telah merealisasikan beberapa rencana kerja yang bersifat kualitatif. Beberapa kebijakan pengembangan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025 disajikan berikut ini:

1. Transformasi pada beberapa hal yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan Bank kedepan yaitu :

- a. Transformasi dari *Product Oriented* menjadi *Market Oriented* , yaitu menyediakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat atau kebutuhan pasar, baik dari segi manfaat maupun pelayanan yang diinginkan masyarakat;
 - b. Transformasi dari orientasi pasar komsumtif ke produktif dengan memberikan porsi penyaluran kredit yang semakin besar ke sektor produktif melalui produk kredit yang dirancang sesuai kebutuhan pasar;
 - c. Transformasi semua unit kerja dan individu di dalam perusahaan menuju profesionalisme dimana pegawai PT. BPR Halden Prime adalah individu yang *high competency* dan *high motivation* yang memiliki cerdas, ikhlas, dan amanah akan pekerjaannya sehingga hal tersebut mampu merubah potensi yang dimiliki menjadi prestasi.
2. Optimalisasi atas implementasi kegiatan yang sudah terlaksana di Bank masih terus dilakukan demi memenuhi pelayanan atas kebutuhan masyarakat dan ketentuan dari lembaga yang berwenang antara lain :
- a. Peningkatan produk dengan meluncurkan produk-produk baru berdasarkan prinsip *Market Oriented*.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c. Senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melakukan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, maupun lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam rangka mewujudkan prinsip reponsibilitas publik sehingga perusahaan dapat tumbuh secara sehat dalam rangka mempertahankan kepercayaan publik.
 - d. Melakukan penyusunan, review, dan update secara berkala atas ketentuan internal Bank agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memerhatikan aspek kepatuhan dan manajemen risiko
3. Meningkatkan pertumbuhan Kredit
- a. Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan membuka kerjasama dengan instansi-instansi di berbagai bidang.
 - b. Aktif melakukan monitoring dalam rangka menjaga kualitas kredit.
- Pengembangan kredit difokuskan pada tiga hal yaitu strategi menjaga kualitas kredit dan pemberian fasilitas kredit. Dalam rangka menjaga kualitas kredit telah dilakukan beberapa strategi, diantaranya:
- Penyusunan Analisa Kredit yang tetap memperhatikan nasabah.
 - Monitoring debitur melalui *Watch List* and *Review* Kolektibilitas setiap bulan serta on the spot secara berkala.
 - Memelihara hubungan baik dengan debitur sehingga kondisi debitur tetap selalu dapat

termonitor dengan baik.

Strategi Promosi dan Pemasaran

Bank telah melakukan promosi seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh Bank dalam melakukan promosi dan pemasaran adalah:

- a. Bank telah melakukan kegiatan promosi melalui pencetakan brosur dan disebar ke pasar-pasar, sekolah dan pusat keramaian.
- b. Bank telah melakukan kegiatan promosi melalui media sosial Instagram
- c. Promosi penjualan

Bank telah melakukan kegiatan promosi melalui :

- Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat menarik perhatian nasabah.
- Pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya kepada nasabah yang setia.

Pelayanan

BPR Halden Prime sangat memprioritaskan pelayanan prima sebagai bagian dari tujuan perusahaan dalam meningkatkan performance bank. Selama ini bank telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan cara :

- a. Memberikan kemudahan terutama dalam tata cara pengajuan kredit dan mudah dipahami.
- b. Memberikan konsultasi balik nasabah dan cepat tanggap terhadap keinginan nasabah dan tanggap terhadap permasalahan yang dimiliki oleh nasabah.
- c. Melayani nasabah secara tepat dan cepat dengan kemampuan berkomunikasi yang baik.
- d. Memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas yang berhubungan dengan bank dan produk yang ditawarkan.
- e. Memberikan rasa aman yaitu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi artinya tetap menjaga kerahasiaan informasi data nasabah, terutama yang berkaitan dengan uang dan pribadi nasabah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan oleh bank yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan bank. Seiring dengan perkembangan bank maka bank juga dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dalam hal ini bank telah melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan penempatannya serta peningkatan sumber daya manusia dengan adanya training dan sertifikasi sesuai bidangnya.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

BPR Halden Prime selalu menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan pendekatan manajemen risiko dalam semua kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko yang dapat terjadi dan berakibat merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan pada beberapa aspek, antara lain :

Risiko Likuiditas

- Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan kesulitan likuiditas.
- Bank selalu memelihara Cash Ratio secara memadai dan mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo.

Risiko Kredit

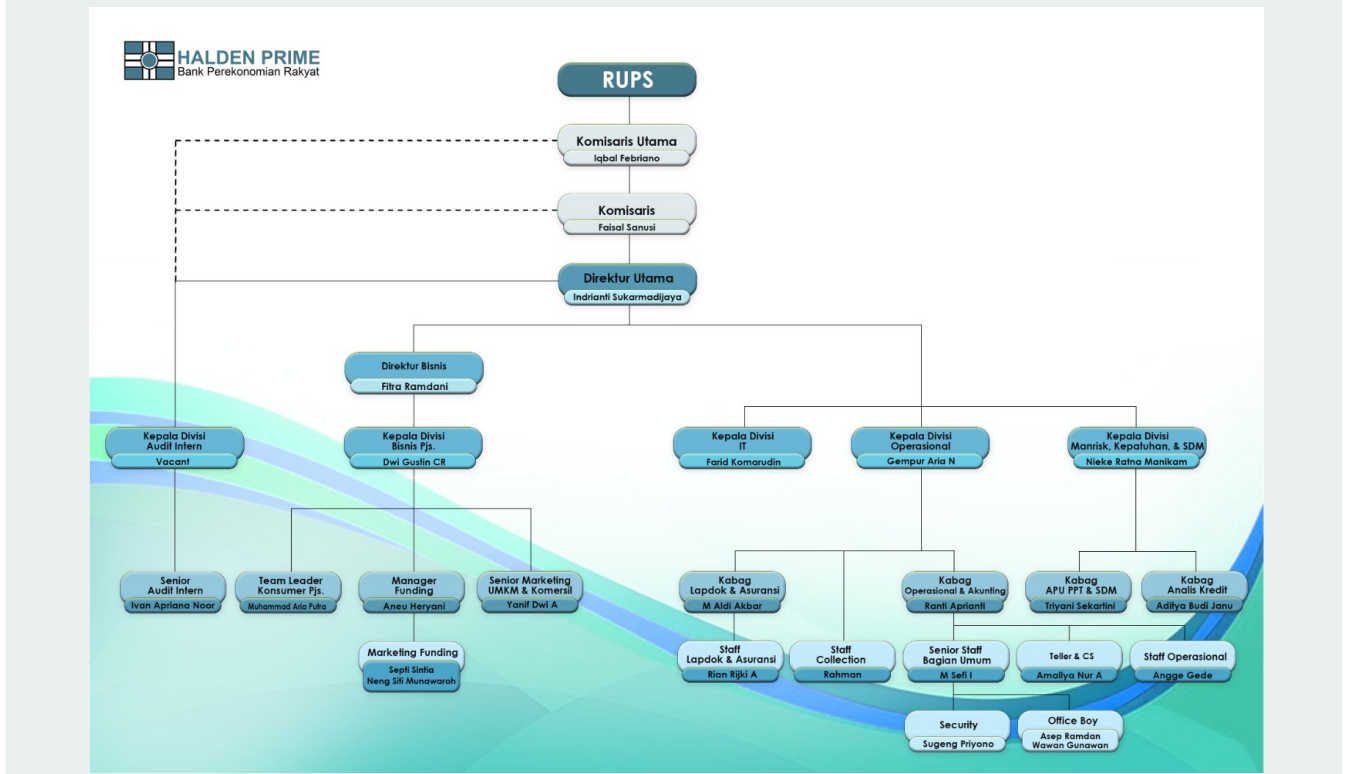
- Bank telah melakukan analisa terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya kembali.
- Bank selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta pembinaan kepada debitur.
- Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.
- Bank telah menetapkan ketentuan tentang pengikatan secara notaris terhadap fasilitas kredit yang diberikan.

Risiko Operasional

- Bank telah melakukan optimalisasi pada fungsi Teknologi Informasi, Audit Intern, dan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan Bank.
- Bank menerapkan kebijakan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, direksi juga senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

-

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS

1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Halden
	Uraian	Simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang disisihkan, disimpan di bank atau tempat aman lainnya, dan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa biaya administasi bulanan
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar

	Nama Produk	Tabungan Prime
	Uraian	Simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang disisihkan, disimpan di BPR, dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan biaya admin tiap bulan sebesar Rp. 2.500,-
3.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Ramadhan Fitri
	Uraian	Simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang disisihkan, disimpan di BPR, dan dapat ditarik sesuai syarat tertentu yaitu sebelum idul fitri tahun berikutnya.
4.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito Berjangka
	Uraian	Deposito berjangka dengan jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan suku bunga maksimal sesuai penjaminan LPS
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Mikro
	Uraian	Pinjaman dengan plafond Rp.500.000,00 s.d. Rp. 10.000.000,00, jangka waktu 3 s.d. 12 bulan, bunga 40% s.d. 48% flat per tahun tanpa agunan
6.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit UKM
	Uraian	Pinjaman dengan plafond Rp.10.000.000,00 s.d. Rp. 150.000.000,00, jangka waktu 12 s.d. 36 bulan, bunga 15% s.d. 25% flat per tahun dengan agunan
7.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana

	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Komersil
	Uraian	Pinjaman dengan plafond Rp.150.000.000,00 s.d. Rp. 2.000.000.000,00, jangka waktu 12 s.d. 60 bulan, bunga 12% s.d. 20% flat per tahun dengan agunan
8.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Kebutuhan Operasional Sekolah Swasta
	Uraian	Pinjaman dengan plafond maksimal Rp.350.000.000,00, jangka waktu maksimal 36 bulan, bunga 12% s.d. 25% flat per tahun dengan agunan
9.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Multiguna Pegawai
	Uraian	Pinjaman dengan plafond maksimal Rp.5.000.000,00 s.d. Rp. 150.000.000,00, jangka waktu 12 s.d. 60 bulan, bunga 12% s.d. 24% flat per tahun dengan agunan

5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada nasabah serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, pengembangan usaha, dan laporan kepada otoritas, dibutuhkan keandalan teknologi informasi yang memadai, oleh karena itu BPR telah melakukan upaya dalam pengembangan sistem baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak eksternal di antaranya:

1. Sistem Operasional

- a. BPR menggunakan Core Banking System Alternet, bekerja sama dengan vendor PT. Anugerah Lestari Teknokreasi.
- b. BPR menyediakan layanan Mobile Collection, yang digunakan oleh Funding Pasar dalam kunjungan ke nasabah yang ingin menabung di lapangan.

2. Sistem Operasional dan Digitalisasi di Lingkungan BPR

- a. Sistem Monitoring Neraca dan Keuangan – digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi Neraca Harian atau pun bulanan..
- b. WA BLAST (fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim pesan massal secara bersamaan tanpa harus menyimpan nomor pengguna) – digunakan untuk promosi, pengingat angsuran kredit .
- c. HRIS (Sistem Manajemen Pegawai) – digunakan untuk mendukung kebutuhan manajemen kepegawaian.
- d. Web BPR – Sebagai Informasi, legalitas dan Laporan-laporan Publikasi BPR

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Upaya pengamanan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh BPR, seperti yang disebutkan, mencakup langkah- langkah yang penting untuk menjaga keberlanjutan operasional serta melindungi data dan sistem dari ancaman yang mungkin terjadi. Berikut adalah penjelasan dan manfaat dari setiap upaya tersebut:

1. BPR memiliki ruangan data center dengan akses terbatas yang ditempatkan di ruangan yang dingin, manfaat menjaga keberlanjutan dan kestabilan sistem IT. Ruangan data center yang memiliki akses terbatas bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah atau ancaman fisik terhadap perangkat keras. Suhu yang dingin juga berfungsi untuk mencegah kerusakan perangkat akibat *overheating*.
2. Secara rutin melakukan backup data pada server dan harddisk eksternal, manfaat menjamin data tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan sistem atau serangan yang merusak data (seperti ransomware). Backup yang rutin mengurangi risiko kehilangan data penting yang dapat mengganggu operasional bisnis.
3. BPR juga sudah memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) dan DRP (*Disaster Recovery Plan*), manfaat meningkatkan ketahanan dan kesiapan BPR dalam menghadapi bencana atau gangguan operasional yang besar. DRC berfungsi sebagai pusat pemulihan sementara, sedangkan DRP adalah rencana tindakan untuk memulihkan sistem dan layanan IT dalam kondisi darurat.
4. Sistem jaringan yang sudah menerapkan *firewall* untuk menambah lapisan keamanan jaringan, manfaat melindungi sistem dari ancaman luar seperti hacker atau malware dengan mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang dapat dilalui.
5. BPR telah memasang SSL pada seluruh sistem BPR untuk mengenkripsi komunikasi antar pengguna dan server, manfaat menjamin kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan antara pengguna dan server. Dengan SSL (*Secure Sockets Layer*), data yang dipertukarkan akan

dienkripsi, sehingga tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang (misalnya saat transaksi online).

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mengalami pertumbuhan usaha yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dengan data sebagai berikut :

Desc	Des-25	Des-24
Total Aset	122,918,228,516	45,870,883,362
Kredit Yang Diberikan	101,313,993,575	35,380,498,731
DPK	102,279,587,583	27,312,152,155
•Tabungan	5,093,779,215	1,880,880,506
•Deposito	79,025,808,368	25,031,271,649
•ABP	18,160,000,000	4,000,000,000
Modal Inti	9,876,521,510	8,593,942,959

Pada sisi Kredit Yang Diberikan, Bank mengalami kenaikan portfolio kredit sebesar 286,36%, dimana komposisi penyaluran dana didominasi Kredit Investasi sebesar 42,00%, Kredit Modal Kerja sebesar 31,64% dan Kredit Konsumtif sebesar 26,36%. Adapun penyaluran Kredit Modal Kerja terdiri dari penyaluran pada berbagai sektor ekonomi seperti properti, restoran, budidaya tambak udang, pendidikan, jasa, dan kredit untuk pedagang pasar. Dari sisi kredit konsumtif terdiri dari kredit multiguna, kredit untuk pegawai dan kredit untuk pensiunan.

Pada sisi DPK, Bank mengalami kenaikan portfolio terutama pada pos deposito dengan pertumbuhan sebesar 315,71%.

Secara keseluruhan pos strategis BPR mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank.

Target pasar Bank dalam hal penyaluran kredit kedepannya akan tetap berfokus pada usaha kecil dan menengah, hal ini dapat dilakukan baik dengan mekanisme sindikasi maupun penyaluran kredit secara langsung kepada end user. Selain itu bank akan melakukan penyaluran kredit kepada Lembaga Pendidikan.

Adapun bank akan melakukan ekspansi dengan berbagai instansi dalam hal penyaluran kredit konsumtif.

7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

Nama Kantor	Kantor Pusat
Alamat	JL TERUSAN KOPO NO 456 D
Desa/Kecamatan	MARGAHAYU SELATAN/MARGAHAYU
Kabupaten/Kota	Kab. Bandung
Kode Pos	40226
Nama Pimpinan	INDRIANTI SUKARMADIJAYA
Nomor Telepon	0225410733
Jumlah Kantor Kas	0

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Permata Dhanawira
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	26 Juli 2024
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran
	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 36 bulan
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	30 Oktober 2024
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran
	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 36 bulan
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Indra Candra d/h MAI BP Indra
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	12 Desember 2025
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Revolving

	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 12 bulan
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Permata Dhanawira
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	23 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran
	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran sebesar Rp. 350.000.000,- dengan jangka waktu selama 36 bulan
5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BANK DANAMON
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 Oktober 2025
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Revolving
	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan jangka waktu selama 12 bulan
6.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Lingga Sejahtera
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	17 Desember 2025
	Jenis Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran
	Uraian Kerja Sama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 36 bulan

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

Sepanjang tahun 2025 ini, BPR Halden Prime tidak terdapat pengaduan nasabah

Tabel Publikasi Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	
1	Produk/Jasa Bank Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%	0
2	Simpanan	0	0	0	0	0	0,00%	0
3	Kredit Tanpa Angunan	0	0	0	0	0	0,00%	0
4	Pinjaman (Modal Kerja, Investasi, Konsumer)	0	0	0	0	0	0,00%	0
Grand Total		0	0		0,00%	0	0,00%	0

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor	
Jumlah Pegawai Pemasaran	6 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	4 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	12 orang
Jumlah Pegawai Tetap	18 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	4 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	4 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	3 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	12 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	14 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	8 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	1 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	6 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	12 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	0 orang

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Aplikasi SIP Takol
	Tanggal Pelaksanaan	07 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Aplikasi SIP Takol
	2.	Nama Kegiatan Pengembangan
Tanggal Pelaksanaan		14 Januari 2025
Jumlah Peserta		1 orang
Pihak Pelaksana		02. Eksternal BPR
Kategori Peserta		03. Pejabat Eksekutif
Uraian Kegiatan		Pelatihan dan Pemahaman BPR/S
3.		Nama Kegiatan Pengembangan
	Tanggal Pelaksanaan	25 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Teknologi Artificial Intelligence
	4.	Nama Kegiatan Pengembangan
Tanggal Pelaksanaan		07 Februari 2025
Jumlah Peserta		13 orang
Pihak Pelaksana		01. Internal BPR
Kategori Peserta		03. Pejabat Eksekutif
Uraian Kegiatan		Pelatihan PSAK
5.		Nama Kegiatan Pengembangan
	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jumlah Peserta	12 orang

	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Perbankan Syariah
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Aplikasi digital SILANJUT
	Tanggal Pelaksanaan	09 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Aplikasi digital SILANJUT
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan CKPN Alt
	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jumlah Peserta	10 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan CKPN Alt
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sertifikasi Direksi
	Tanggal Pelaksanaan	27 Mei 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sertifikasi Direksi
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Training kredit komersil
	Tanggal Pelaksanaan	18 September 2025
	Jumlah Peserta	12 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Training mengenai Kredit komersil
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Dasar Properti dan Rumah Subsidi
	Tanggal Pelaksanaan	20 Oktober 2025

	Jumlah Peserta	8 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Dasar Properti dan Rumah Subsidi
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Perpajakan 2025
	Tanggal Pelaksanaan	07 November 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	PPH badan dan pph 21 (Coretax)
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital Sirenbis
	Tanggal Pelaksanaan	01 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Aplikasi Digital Sirenbis
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Siap-TKS BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	09 Desember 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Aplikasi Siap-TKS BPR/S

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Opini

Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime (d/h PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan) ("BPR") yang terdiri dari Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Kualifikasian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Basis untuk Opini Kualifikasian

Laporan keuangan BPR belum mengakui liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 untuk 18 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap. Pengakuan dan pengukuran liabilitas imbalan kerja tersebut seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 "Imbalan Kerja". Berdasarkan ketentuan tersebut, BPR seharusnya mengakui liabilitas imbalan kerja yang dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto, dan estimasi kenaikan gaji. Namun demikian, manajemen tidak melakukan pengakuan atas liabilitas tersebut dan kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan besarnya liabilitas imbalan kerja yang seharusnya diakui. Akibatnya, kami tidak dapat menentukan dampak penyesuaian yang mungkin diperlukan terhadap liabilitas imbalan kerja, beban terkait, serta akun-akun lain yang relevan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT BPR HALDEN PRIME

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Indrianti Sukarmadijaya
Alamat Kantor : Jl. Terusan Kopo No 456D, Margahayu, Kab. Bandung
Alamat Domisili : Setra Regency Blok B 38 A RT 004 RW 002
Nomor Telepon : 022-5410733
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Fitra Ramdani, ST.
Alamat Kantor : Jl. Terusan Kopo No 456D, Margahayu, Kab. Bandung
Alamat Domisili : JL. Winaya Utama No. 54 RT. 004 RW. 010
Nomor Telepon : 022-5410733
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT BPR HALDEN PRIME telah disusun untuk laporan keuangan posisi tanggal 31 Desember 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR HALDEN PRIME posisi tanggal 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR HALDEN PRIME posisi tanggal 31 Desember 2025 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 28 April 2026
PT BPR HALDEN PRIME

 
EB3B2ANX315951701

Indrianti Sukarmadijaya

Direktur Utama

Fitra Ramdani, ST.

Direktur

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2025
PT BPR HALDEN PRIME

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPR HALDEN PRIME tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

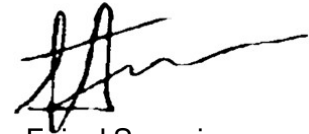
Bandung, 28 April 2026

PT BPR HALDEN PRIME

Dewan Komisaris,



Iqbal Febriano
Komisaris Utama



Faizal Sanusi
Komisaris

Anggota Direksi

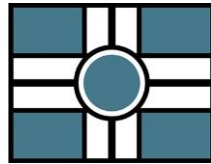


Indrianti Sukarmadijaya
Direktur Utama



Fitra Ramdani
Direktur

PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime
(d/h PT BPR Bank Duta Pasundan)



Laporan Keuangan
31 Desember 2025
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
serta
Laporan Auditor Independen



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Halaman

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4
		Rp	(Disajikan kembali) Rp
ASET LANCAR			
Kas	4	245.098.500	64.918.600
Pendapatan bunga yang akan diterima	3c,5	1.856.313.989	303.481.129
Penempatan pada bank lain :	3d,3e,6		
Pihak ketiga		13.355.791.672	7.553.057.827
Penyisihan kerugian		(17.503.465)	(1.036.131)
Jumlah bersih		13.338.288.207	7.552.021.696
Kredit yang diberikan	3b,3f,7		
Jumlah kredit yang diberikan		101.313.993.575	35.380.498.733
Penyisihan kerugian		(559.358.558)	(233.024.474)
Provisi		(6.069.099)	(18.116.950)
Jumlah bersih		100.748.565.918	35.129.357.309
Biaya dibayar dimuka	3i,8	919.615.313	198.784.147
Jumlah Aset Lancar		<u>117.107.881.927</u>	<u>43.248.562.881</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3h,9	1.099.947.555	823.927.858
Aset tetap tidak berwujud	10	68.645.838	78.645.834
Aset lain-lain	11	3.168.435.981	180.514.462
Aset pajak tangguhan		1.473.317.215	1.539.232.327
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>5.810.346.589</u>	<u>2.622.320.481</u>
JUMLAH ASET		122.918.228.516	45.870.883.362

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

LIABILITAS DAN EKUITAS

	Catatan	2025	2024
		Rp	(Disajikan kembali) Rp
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3n,12	52.087.631	28.449.102
Utang bunga	13	201.523.982	90.202.228
Utang pajak	3m,16b	57.921.649	32.259.034
Simpanan	3k,14	84.119.587.584	26.912.152.155
Simpanan dari bank lain	15	18.161.024.347	4.000.000.000
Pinjaman yang diterima	18	10.315.858.674	6.052.800.161
Liabilitas lain-lain	19	133.703.139	161.077.724
Jumlah liabilitas		113.041.707.006	37.276.940.404
EKUITAS			
Modal			
Modal saham			
Modal dasar 500.000 saham (2024) dan 200.000 saham (2023) dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham.			
Ditempatkan dan disetor penuh sebesar 191.250 (2024) dan 121.250 (2023)	20	20.125.000.000	19.125.000.000
Cadangan	3o,21	300.000.000	300.000.000
Akumulasi kerugian		(10.548.478.490)	(10.831.057.041)
Jumlah ekuitas		9.876.521.510	8.593.942.959
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		122.918.228.516	45.870.883.362

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan kembali)
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :	3p,22		
Bunga		9.570.957.792	4.039.723.132
Provisi dan administrasi		1.450.331.476	662.250.878
Jumlah pendapatan bunga		11.021.289.268	4.701.974.010
Beban bunga	3p,23	(3.446.902.389)	(1.457.864.742)
Biaya Transaksi		(75.734.603)	(6.018.738)
Jumlah beban bunga		(3.522.636.992)	(1.463.883.480)
Pendapatan bunga, bersih		7.498.652.276	3.238.090.530
Pendapatan operasional lainnya	24	130.035.453	70.396.989
		7.628.687.729	3.308.487.519
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian	25	(354.695.110)	(195.300.533)
Penyusutan	26	(199.847.957)	(126.169.039)
Pemasaran	27	(1.960.000)	(2.713.400)
Tenaga kerja	28	(3.825.771.764)	(3.963.475.234)
Umum dan administrasi	29	(2.744.238.153)	(1.330.624.590)
Jumlah beban operasional		(7.126.512.984)	(5.618.282.796)
Laba (rugi) Operasional		502.174.745	(2.309.795.277)
Pendapatan (beban) non operasional	30	(146.376.194)	(81.143.702)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	3m	355.798.551	(2.390.938.979)
Pajak penghasilan :	16a		
Pajak kini		—	
Pajak tangguhan (beban)	16,c	(65.915.114)	228.983.651
Laba (rugi) bersih tahun berjalan		289.883.437	(2.161.955.328)
Penghasilan komprehensif lain		—	—
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		289.883.437	(2.161.955.328)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	Modal disetor	Dana Setoran Modal - Ekuitas	Cadangan	Akumulasi Kerugian	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	12.125.000.000	3.000.000.000	300.000.000	-9.979.350.390)	5.445.649.610
Setoran modal	7.000.000.000	–	–	–	7.000.000.000
Dana setoran modal – Ekuitas	–	(3.000.000.000)	–	–	(3.000.000.000)
Koreksi dampak perubahan standar akuntansi	–	–	–	1.310.248.676	1.310.248.676
Rugi komprehensif tahun berjalan	–	–	–	(2.161.955.328)	(2.161.955.328)
Saldo per 31 Desember 2024	19.125.000.000	–	300.000.000	(10.831.057.042)	8.593.942.958
Setoran modal	1.000.000.000	–	–	–	1.000.000.000
Koreksi dampak perubahan standar akuntansi	–	–	–	(7.304.886)	(7.304.886)
Laba komprehensif tahun berjalan	–	–	–	289.883.438	289.883.438
Saldo per 31 Desember 2025	20.125.000.000	–	300.000.000	(10.548.478.490)	9.876.521.510

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan kembali)
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	9.570.957.792	4.039.723.132
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	1.450.331.476	662.250.878
Pendapatan operasional lainnya	130.035.453	70.396.989
Pembayaran beban bunga	(3.515.958.167)	(1.463.883.480)
Beban gaji dan tunjangan	(3.755.075.303)	(3.963.475.234)
Beban umum dan administrasi	(1.901.849.705)	(1.330.624.590)
Beban operasional lainnya	(1.576.859.492)	(324.182.972)
Pendapatan non operasional lainnya	193.102.912	12.017.435
Beban non operasional lainnya	(197.994.515)	(93.161.137)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	396.690.451	(2.390.938.979)
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:	-	-
Penempatan pada bank lain	4.507.261.910	5.106.142.398
Kredit yang diberikan	(65.619.208.610)	(27.833.756.138)
Aset lain-lain	(5.262.682.998)	(61.957.349)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	-	-
Penurunan/(kenaikan) liabilitas operasi:	-	-
Liabilitas segera	45.652.028	98.357.300
Tabungan	3.211.787.599	-
Deposito	53.994.536.719	19.632.020.474
Simpanan dari bank lain	14.161.024.347	150.000.000
Pinjaman yang diterima	4.263.655.508	(6.052.800.161)
Liabilitas lain-lain	80.117.094	(11.181.264)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	764.310.228	953.475.617

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025

	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan kembali)
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap	(318.478.891)	(877.535.088)
Pembelian aset tidak berwujud	9.999.996	(80.000.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(308.478.895)	(957.535.088)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pinjaman yang diterima	1.000.000.000	4.000.000.000
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.000.000.000)	4.000.000.000
Kenikan bersih kas dan setara kas	1.455.831.333	3.995.940.529
Saldo awal kas dan setara kas	2.857.537.911	411.157.816
Saldo akhir kas dan setara kas	4.313.374.244	4.407.098.345
Saldo akhir kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	245.098.500	64.918.600
Giro	4.068.275.744	4.342.179.745
Total kas dan setara kas	4.313.374.244	4.407.098.345

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

1. UMUM

PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan untuk selanjutnya disebut “BPR” didirikan berdasarkan akta notaris Detty Tresnawaty, SH No. 18 tanggal 28 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07993 HT.01.04.Th 2002 tanggal 8 Mei 2002. Anggaran dasar BPR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Laty Gayanti, SH. No. 09 tanggal 15 Mei 2025 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diantaranya pergantian nama dari PT BPR Bank Duta Pasundan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime. Perubahan tersebut telah disimpan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-003158.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 15 Mei 2025.

Kegiatan utama BPR adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit. BPR berkedudukan di jalan Terusan Kopo No. 456 D Margahayu, Kabupaten Bandung. Jumlah karyawan tahun 2025 dan 2024 adalah sebanyak 18 orang tetap dan 8 orang tidak tetap (2025) serta 14 orang tetap dan 12 orang tidak tetap (2024).

Berdasarkan akta notaris Laty Gayanti, SH. No. 01 tanggal 17 September 2025, susunan direksi mengalami perubahan. Akta notaris tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Pengesahan No. AHU-AH.01.09-9033.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 September 2025. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPR per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2 0 2 5	2 0 2 4
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: Iqbal Febriano	Iqbal Febriano
Komisaris	: Faizal Sanusi	-----
Dewan Direksi		
Direktur Utama	: Indrianti Sukarmadijaya	Indrianti Sukarmadijaya
Direktur	: Fitra Ramdani	-----

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Sejak 1 Januari 2025, BPR telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang sebelumnya digunakan. Penerapan SAK Entitas Privat tersebut mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi tertentu, terutama terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan. Manajemen telah mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini dan menyesuaikan kebijakan akuntansi Entitas agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK Entitas Privat.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK Entitas Privat) dilakukan secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan BPR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah disajikan kembali agar dapat dibandingkan dan disajikan secara konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada periode berjalan. Dampak kumulatif dari penerapan standar ini, jika ada, telah disesuaikan pada saldo awal ekuitas Entitas pada awal periode komparatif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK Entitas Privat yang telah diberlakukan bagi Bank Perekonomian Rakyat sejak 1 Januari 2025, dengan berpedoman pada Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK Entitas Privat berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Laporan keuangan BPR terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran nilai lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut serta berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas dari aktivitas operasi yang disusun menggunakan metode tidak langsung.

Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen atas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Sebagai akibatnya, suatu investasi umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh, tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Cerukan (*bank overdraft*) pada umumnya dianggap sebagai aktivitas pendanaan serupa dengan pinjaman. Akan tetapi, jika cerukan dapat dibayar kembali sewaktu-waktu berdasarkan permintaan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk dalam komponen kas dan setara kas.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, dan indikator biaya.

Pembukuan BPR diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK Entitas Privat.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi pada tahun berjalan.

b. Instrumen Keuangan

Aset keuangan adalah kas, piutang, atau instrumen kontraktual yang memberikan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

1. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai:
 - a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal.
 - b. Piutang usaha dan pinjaman yang diberikan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).
 - c. Investasi jangka pendek/efek yang diperdagangkan diukur pada nilai wajar jika dapat ditentukan dengan andal.
2. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai:
 - a. Utang usaha dan utang lain-lain diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.
 - b. Pinjaman bank dan utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan.

Pengukuran Awal

Mensyaratkan model biaya perolehan diamortisasi untuk seluruh instrumen keuangan dasar. Pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

1. Aset dan liabilitas keuangan dasar: diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.
2. Investasi ekuitas publik : nilai wajar dapat diukur secara andal.
3. Instrumen kompleks (derivatif, sekuritisasi): mengukur seluruh instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar di laba rugi.
4. Ekuitas yang tidak diperdagangkan secara publik dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Penurunan Nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, entitas langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
- b. pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
- c. kreditur memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditur jika bukan, karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
- d. terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.

Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.

Penghentian Pengakuan

1. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika salah satu dari:

- a. hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan kedaluwarsa atau diselesaikan, atau
- b. entitas mengalihkan kepada pihak lain secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

2. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) hanya ketika liabilitas tersebut berakhir yaitu:

- a. ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.
- b. Jika peminjam dan pemberi pinjaman mengganti instrumen keuangan dengan syarat yang berbeda secara substansial, maka entitas peminjam dan pemberi pinjaman mencatat transaksi tersebut sebagai pengakhiran liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
- c. Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang dihapuskan atau yang dialihkan kepada pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih.

c. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

d. Giro Pada Bank Lain

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Penempatan Pada Bank Lain (Lanjutan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%
Macet	100%

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan provisi kredit dan penyisihan kredit.

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh PT BPR Bank Duta Pasundan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat.

Kualitas aset produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

BPR wajib menetapkan Kualitas aset produktif yang sama terhadap beberapa rekening aset produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas aset produktif terhadap beberapa rekening aset 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing aset produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Penyisihan aset produktif

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat "PPKA" adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>
Lancar	: 0,5%
Dalam Perhatian Khusus	: 3% setelah dikurangi dengan nilai agunan
Kurang Lancar	: 10% setelah dikurangi dengan nilai agunan
Diragukan	: 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan
Macet	: 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA ditetapkan paling tinggi sebesar:

<u>Persentase</u>	<u>Keterangan</u>
100%	Dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
85%	Dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan
80%	Dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia
70%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan sampai 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang
60%	Dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia
50%	Dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat
50%	Dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Penyisihan aset produktif (Lanjutan)

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA ditetapkan paling tinggi sebesar (Lanjutan) :

<u>Persentase</u>	<u>Keterangan</u>
50%	Dari nilai hipotik atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan yang telah dilakukan pengikatan hipotik atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
50%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang
50%	Untuk bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat
30%	Dari nilai agunan berupa resi gudang yang penelitiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang
20%	Dari nilai agunan yang dinilai satu tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur dalam standar penilaian yang berlaku

Agunan selain yang dimaksud di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPKA.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan berupa kendaraan bermotor:

1. Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
2. Tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Penyisihan aset produktif (Lanjutan)

Aktiva produktif dihapusbukukan pada saat manajemen menyatakan bahwa Aktiva Produktif tersebut tidak mungkin tertagih. Penerimaan kembali Aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya dalam tahun berjalan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang, atas aset keuangan atau kelompok keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disebut "CKPN" adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

BPR melakukan evaluasi secara berkala pada tiap tanggal neraca untuk mengevaluasi akan adanya bukti obyektif bahwa aset keuangan ataupun kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikatakan mengalami penurunan nilai, jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut dan peristiwa tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang.

Penurunan nilai berlaku untuk seluruh jenis aset keuangan yang dimiliki oleh BPR, antara lain surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit dan penyertaan modal.

Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya biaya perolehan diamortisasi.

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, BPR harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Sistematis dan konsisten sepanjang waktu.
2. Sejalan dengan kriteria yang bersifat obyektif.
3. Didukung dengan dokumentasi yang memadai.

Identifikasi Bukti Obyektif

BPR harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan trend historis, informasi yang tersedia, dengan disertai analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan BPR.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

f. **Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan BPR dalam menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi ,engenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan , tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan

Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai

1) Secara individual :

BPR menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual. Estimasi jumlah kerugian aset keuangan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgment* , serta memperhatikan berbagai faktor. Frekuensi *rolover* kredit dapat menjadi indikator bukti obyektif penurunan nilai.

2) Secara kolektif :

BPR mengelompokan kredit ayng akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Pengelompokan ini harus disertai dengan dokumentasi yang memadai.

Periode Evaluasi penurunan nilai dilakukan setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.

Teknik penurunan nilai BPR menggunakan :

- 1) Secara individual BPR dapat menggunakan beberapa teknik evaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, anatar lain : *Discounted cash flow*, estimasi nilai yang dapat direalisasi dari agunan, dan jika tidak ada kemampuan membayar, menggunakan pendekatan agunan.
- 2) Secara kolektif BPR melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (*historical loss rate* atau *historical net charge-off rate*)

Dalam hal BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama, akuisisi dan/atau penggabungan usaha, dan/atau mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untyk perhitungan CKPN kolektif dapat menggunakan peer group data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 dua) tahun bisnis normal.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil-alih tersebut dibebankan pada penyisihan penghapusan.

Beban-beban sehubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan aktiva tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih dibentuk atas selisih antara nilai tercatat agunan diambil alih dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Laba atau rugi yang berasal dari penjualan agunan yang diambil-alih diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus (*straight line method*)

i. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK Entitas Privat.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat tahun	% per tahun
Inventaris kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

j. Beban Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

k. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

l. Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan PP Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat Publik Bab 28 tentang "Imbalan Kerja". Dalam ketentuan tersebut BPR diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

1. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah program imbalan pasti.

m. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, BPR harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak Penghasilan Kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan laba kena pajak untuk periode berjalan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak kini diakui sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar atas laba kena pajak periode berjalan. Jika pembayaran pajak yang telah dilakukan melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisih tersebut diakui sebagai aset pajak kini. Kewajiban atau aset pajak kini dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada/diterima dari otoritas pajak, dengan menggunakan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, kecuali untuk *goodwill* yang tidak dapat dikurangkan pajak dan pengakuan awal aset/liabilitas dari transaksi non-bisnis.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar. Pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tangguhan tersebut berasal dari transaksi yang langsung diakui ke ekuitas, maka dampaknya juga diakui langsung ke ekuitas.

n. Kewajiban Segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Cadangan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, BPR wajib, setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

p. Penurunan Nilai Aset

BPR pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing*).

Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

r. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian diperlakukan sebagai pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian diakui pada saat terjadinya. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian namun terkait dengan jangka waktu, diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

s. Transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi

BPR melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK Entitas Privat Bab 33, “Pengungkapan pihak berelasi”. Transaksi dan saldo Bank terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b. memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas entitas.
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*.
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv).
- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang, yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vii. Pihak tersebut adalah imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

BPR menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak dan tanggungannya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

4. K A S

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Uang tunai	<u>245.098.500</u>	<u>64.918.600</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terhadap risiko kebongkaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000 manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Kredit yang diberikan	1.853.711.255	300.571.646
Antar bank aktiva	2.602.734	2.909.483
	<u>1.856.313.989</u>	<u>303.481.129</u>

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Giro pada bank lain :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Central Asia, Tbk	1.997.483.516	2.203.129.607
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.954.320.016	2.003.110.611
PT Bank Permata, Tbk	57.611.345	57.446.327
PT Bank Jabar Banten, Tbk	33.642.559	33.523.518
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	24.980.308	24.980.308
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	238.000	-
Jumlah giro pada bank lain - dipindahkan	<u>4.068.275.744</u>	<u>4.322.190.371</u>
Tabungan dan deposito :		
Tabungan		
Pihak ketiga :		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.884.154.061	1.556.717.594
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	548.796.437	327.522.192
PT. BPR Lingga Sejahtera	501.417.510	-
PT BPR Karyajatnika Sadaya	104.703.323	100.793.269
Jumlah tabungan - dilanjutkan	<u>3.039.071.331</u>	<u>1.884.239.786</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
Giro pada bank lain – pindahan	<u>4.068.275.744</u>	<u>4.322.190.371</u>
Tabungan dan deposito (Lanjutan) :		
Tabungan (Lanjutan)		
Pihak ketiga :		
Jumlah tabungan - lanjutan	3.039.071.331	1.884.239.786
PT BPR Permata Dhanawira	104.062.755	101.983.269
PT BPR Lestari Bali	43.893.420	43.678.880
PT BPR Indra Candra d/h MAI BP Indra	53.421	172.252
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	440.000	-
	<u>3.187.520.927</u>	<u>2.130.867.456</u>
Deposito :		
Pihak ketiga :		
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000.000	-
PT. BPR Lingga Sejahtera	1.000.000.000	-
PT. BPR Indra Candra d/h MAI BP Indra	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Bumi Pendawa Raharja	100.000.000	100.000.000
	<u>6.100.000.000</u>	<u>1.100.000.000</u>
Jumlah tabungan dan deposito pada bank lain	<u>9.287.520.928</u>	<u>3.230.867.456</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	13.355.791.671	7.553.057.827
Dikurangi : Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(17.503.465)	(1.036.131)
Jumlah bersih	<u>13.338.288.207</u>	<u>7.552.021.696</u>

Tingkat suku bunga giro dan tabungan berkisar antara 1% – 3 % (2025) dan 1,00 % – 3,00 % (2024)

Tingkat suku bunga tabungan berkisar antara 1,00 % - 2,50% (2025) dan sebesar 1,00 % - 2,50% (2024).

Tingkat suku bunga deposito berkisar antara 5,00% - 6,75% dan per tahun dengan jangka waktu penempatan antara 1(satu) bulan dan diperpanjang otomatis pada tahun 2025 dan 2024.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Saldo awal tahun	1.036.131	31.498.433
Beban kerugian penurunan nilai tahun berjalan	28.361.026	1.036.131
Pemulihan kerugian tahun berjalan	(11.893.692)	(31.498.433)
Saldo akhir tahun	<u>17.503.465</u>	<u>1.036.131</u>

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan sebagai lancar. Manajemen BPR berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis kredit

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Kredit <i>instalment</i> investasi	42.550.000.000	—
Kredit pensiunan <i>installment</i>	20.968.595.216	3.478.190.494
Kredit <i>installment</i> modal kerja	20.747.577.906	13.976.182.267
Kredit reguler modal kerja	11.182.044.368	12.681.458.475
Kredit tanpa agunan	4.831.221.000	4.348.034.158
Kredit karyawan	909.555.085	656.633.339
Kredit tanpa agunan diskonto	125.000.000	240.000.000
Kredit <i>installment</i> konsumsi		
Jumlah	<u>101.313.993.575</u>	<u>35.380.498.733</u>
Provisi kredit	(6.069.099)	(18.116.950)
Jumlah kredit yang diberikan	<u>101.307.924.476</u>	<u>35.362.381.783</u>
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(559.358.558)	(233.024.474)
Jumlah bersih	<u>100.748.565.918</u>	<u>35.129.357.309</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Berdasarkan penggunaan

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Investasi	41.250.000.000	-
Modal kerja	33.410.733.385	26.906.974.076
Kredit konsumtif	<u>26.653.260.190</u>	<u>8.473.524.657</u>
Jumlah	101.313.993.575	35.380.498.733
Provisi kredit	<u>(6.069.099)</u>	<u>(18.116.950)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	101.307.924.476	35.362.381.783
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(559.358.558)	(233.024.474)
Jumlah bersih	<u><u>100.748.565.918</u></u>	<u><u>35.129.357.309</u></u>

c. Berdasarkan sektor ekonomi

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Angkutan udara untuk barang	41.250.000.000	-
Bukan lapangan usaha	26.653.260.190	8.473.524.657
Konstruksi	24.685.304.275	20.026.992.138
Restoran dan makanan	1.358.696.245	700.000.004
Perdagangan mobil	1.119.981.416	1.613.407.473
Aktivitas penunjang keuangan lainnya	1.000.000.000	-
Portal Web /atau platform digital	999.850.842	-
Aktivitas pos dan kurir	493.426.057	500.000.000
Penggalian batu, pasir dan tanah liat	480.000.000	480.000.000
Dagang ecer-barang baru lain	457.000.000	121.637.502
Dagang besar alat laboratorium	425.000.000	447.500.000
Pendidikan lainnya	446.000.000	240.000.000
Dagang besar tekstil, pakaian dan alas kaki	395.984.439	138.888.884
Perdagangan besar / balas jasa	363.857.922	195.000.000
Aktivitas ketenagakerjaan	357.952.720	400.000.000
Dagang besar barang keperluan rumah tangga	300.000.000	600.000.000
Budidaya biota air payau udang	233.333.330	1.183.333.342
Perdagangan besar bahan makanan	207.777.778	112.499.997
Dagang ecer-komoditi makanan dari hasil tani	81.285.020	146.714.736
Dagang ecer-makanan, minuman dan tembakau	5.283.341	1.000.000
Jumlah	101.313.993.575	35.380.498.733
Provisi kredit	<u>(6.069.099)</u>	<u>(18.116.950)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	101.307.924.476	35.362.381.783
Dikurangi : Cadangan kerugian penunman nilai	(559.358.558)	(233.024.474)
Jumlah bersih	<u><u>100.748.565.918</u></u>	<u><u>35.129.357.309</u></u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

d. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Sampai dengan 1 tahun	10.078.320.678	11.030.927.851
Lebih dari 1 tahun – sampai dengan 3 tahun	68.087.473.207	20.005.433.314
Lebih dari 3 tahun	<u>23.148.199.690</u>	<u>4.344.137.568</u>
Jumlah	101.313.993.575	35.380.498.733
Provisi kredit	(6.069.099)	(18.116.950)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	101.307.924.476	35.362.381.783
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(559.358.558)	(233.024.474)
Jumlah bersih	<u><u>100.748.565.918</u></u>	<u><u>35.129.357.309</u></u>

e. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Lancar	85.538.880.744	32.606.721.142
Dalam Pengawasan	12.940.017.528	2.210.677.608
Kurang lancar	1.791.321.290	239.465.231
Diragukan	136.124.572	22.661.057
Macet	<u>907.649.441</u>	<u>300.973.695</u>
Jumlah	101.313.993.575	35.380.498.733
Provisi kredit	(6.069.099)	(18.116.950)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	101.307.924.476	35.362.381.783
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(559.358.558)	(233.024.474)
Jumlah bersih	<u><u>100.748.565.918</u></u>	<u><u>35.129.357.309</u></u>

f. Kredit bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian kredit bermasalah dan penyisihannya menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Kredit bermasalah (Lanjutan)

Sektor ekonomi :

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 5 Macet Rp	Jumlah Rp
Bukan lapangan usaha	519.921.291	134.956.309	48.859.931	703.737.531
Restoran dan makanan	-	-	498.800.000	498.800.000
Aktivitas ketenagakerjaan	-	-	357.952.720	357.952.720
Dagang ecer-komoditi makanan dari hasil tani	-	1.168.263	2.036.790	3.205.053
Konstruksi	1.271.400.000	-	-	1.271.400.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah	1.791.321.291	136.124.572	907.649.441	2.835.095.304
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.683.117)	(1.036.507)	(7.952.870)	(30.672.494)
Jumlah bersih	<u>1.769.638.174</u>	<u>135.088.065</u>	<u>899.696.571</u>	<u>2.804.422.810</u>

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 4 Macet Rp	Jumlah Rp
Bukan lapangan usaha	239.465.231	-	5.122.695	244.587.926
Konstruksi	-	22.661.057	295.851.000	318.512.057
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah	239.465.231	22.661.057	300.973.695	563.099.983
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.807.323)	(11.330.528)	(5.122.695)	(37.260.546)
Jumlah bersih	<u>218.657.908</u>	<u>11.330.529</u>	<u>295.851.000</u>	<u>525.839.437</u>

Penggunaan :

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 5 Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	1.271.400.000	1.168.263	858789510	2.131.357.773
Konsumtif	519.921.291	134.956.309	48.859.931	703.737.531
Investasi	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah	1.791.321.291	136.124.572	907.649.441	2.835.095.304
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.683.117)	(1.036.507)	(7.952.870)	(30.672.494)
Jumlah bersih	<u>1.769.638.174</u>	<u>135.088.065</u>	<u>899.696.571</u>	<u>2.804.422.810</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Kredit bermasalah (Lanjutan)

Penggunaan (Lanjutan) :

	Kurang lancar Rp	2 0 2 4 Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	-	-	295.851.000	295.851.000
Investasi	-	-	-	-
Kredit konsumtif	239.465.231	22.661.057	5.122.695	267.248.983
Jumlah	239.465.231	22.661.057	300.973.695	563.099.983
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.807.323)	(11.330.528)	(5.122.695)	(27.015.156)
Jumlah bersih	<u>218.657.908</u>	<u>11.330.529</u>	<u>295.851.000</u>	<u>536.084.827</u>

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 %	2 0 2 4 %
NPL Gross	2,80	1,59
NPL Net	2,63	1,48

g. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Saldo awal tahun	233.024.474	39.104.725
Beban kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	326.334.084	194.264.402
Pemulihan PPAP	-	(344.653)
Saldo akhir tahun	<u>559.358.558</u>	<u>233.024.474</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing akun kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 435.621.732 dan Rp 235.191.667.
- b. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebesar 6,50% - 11,98% (2025) dan 5,00% - 29,00% (2024).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

- d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	863.715.216	724.837.149
Pihak ketiga	1.727.430.432	1.449.674.298
Kelompok	2.591.145.648	2.174.511.447

Pada tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Sewa gedung	494.166.665	11.666.672
Iklan dan promosi	12.274.994	9.680.000
Premi asuransi	1.537.488	3.019.179
Souvenir deposito	-	875.000
Lainnya	411.636.166	173.543.296
Jumlah	919.615.313	198.784.147

9. ASET TETAP

	2 0 2 5				
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Koreksi Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung :					
Inventaris kantor	505.806.450	257.647.000	192.105.850	69.974.001	641.321.600
Kendaraan	804.931.188	356.500.000	190.000.000	-	971.431.188
Jumlah	1.310.737.638	614.147.000	382.105.850	69.974.001	1.612.752.788
Akumulasi penyusutan :					
Kepemilikan langsung :					
Inventaris kantor	398.864.337	53.565.937	192.105.850	69.815.842	330.140.266
Kendaraan	87.945.443	136.282.024	41.562.500	-	182.664.967
Jumlah	486.809.780	189.847.961	233.668.350	69.815.842	512.805.233
Nilai buku	823.927.858				1.099.947.555

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

9. **ASET TETAP (Lanjutan)**

	2	0	2	4	
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung :					
Inventaris kantor	488.226.550	72.603.900	-	(55.024.000)	505.806.450
Kendaraan	29.900.000	804.931.188	29.900.000	-	804.931.188
Jumlah	<u>518.126.550</u>	<u>877.535.088</u>	<u>29.900.000</u>	<u>(55.024.000)</u>	<u>1.310.737.638</u>
Akumulasi penyusutan :					
Kepemilikan langsung :					
Inventaris kantor	417.018.917	36.869.420	-	(55.024.000)	398.864.337
Kendaraan	29.899.998	87.945.445	29.900.000	-	87.945.443
Jumlah	<u>446.918.915</u>	<u>124.814.865</u>	<u>29.900.000</u>	<u>(55.024.000)</u>	<u>486.809.780</u>
Nilai buku	<u><u>71.207.635</u></u>				<u><u>823.927.858</u></u>

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 189.847.962 (2025) dan Rp 124.814.865 (2024).

Pada tahun 2025, Perusahaan telah menjual 1 (satu) unit kendaraan dan beberapa inventaris kantor. Dari hasil penjualan tersebut diperoleh laba sebesar Rp 36.062.500 dengan penjelasan sebagai berikut :

	Kendaraan	Inventaris kantor	Jumlah Rp
Harga jual	150.000.000	34.500.000	184.500.000
Nilai buku	148.437.500	-	148.437.500
Laba penjualan aset tetap			<u><u>36.062.500</u></u>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BPR menempati tanah dan bangunan sewa, yang akan berakhir pada tanggal 20 Februari 2026. Perjanjian sewa gedung telah diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 20 Februari 2027 (Lihat Catatan 42).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
<i>Software</i>	140.024.000	140.024.000
Akumulasi amortisasi	(71.378.162)	(61.378.166)
Jumlah	68.645.838	78.645.834

Perubahan amortisasi *software* berwujud adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	61.378.166	60.023.992
Amortisasi tahun berjalan	9.999.996	1.354.174
Saldo akhir tahun	71.378.162	61.378.166

11. ASET LAIN-LAIN

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Renovasi gedung	2.975.350.000*)	-
Uang muka <i>core banking</i> & PPOB	153.784.427	153.784.427
Persediaan barang cetakan dan materai	13.051.000	19.629.482
Uang muka deposit listrik dan telpon	400.297	400.297
Lainnya	25.850.257	6.700.256
Jumlah	3.168.435.981	180.514.462

*) Saldo aset lain-lain renovasi gedung, merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan BPR untuk merenovasi atas gedung yang disewa dari Hj. Entang Roswati berlokasi di jalan Buah Batu No. 105 Bandung. Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang untuk renovasi, yaitu dimulai pada tanggal 4 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2030. Biaya atas sewa gedung tersebut akan diamortisasi selama 4 (empat) tahun.

Perjanjian sewa menyewa diaktakan pada notaris Desiyana Chafsah, S.H. No. 14 tanggal 4 Agustus 2025 (Lihat Catatan 42).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

12. LIABILITAS SEGERA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Titipan nasabah	32.311.580	10.772.147
Titipan lainnya	19.776.051	17.676.955
Jumlah	<u><u>52.087.631</u></u>	<u><u>28.449.102</u></u>

13. UTANG BUNGA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Bunga deposito	151.147.249	79.704.737
Bunga simpanan bank lain	49.943.137	10.497.492
Jumlah	<u><u>201.090.386</u></u>	<u><u>90.202.229</u></u>

14. SIMPANAN

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tabungan :		
Tabungan Halden (d/h Tabungan Duta)	2.343.740.403	1.023.375.155
Tabungan pasundan	935.659.482	649.830.296
Tabungan Paket Duta	1.593.332.555	150.932.225
Tabungan Ramadan Fitri	219.883.863	55.899.589
Tabungan duta pendidikan	1.167.913	843.241
Jumlah tabungan	<u><u>5.093.784.216</u></u>	<u><u>1.880.880.506</u></u>
Deposito berjangka :		
Menurut jangka waktu :		
Sampai dengan 3 bulan	18.323.775.648	16.396.791.450
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	6.828.466.720	2.340.430.199
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	53.873.566.000	6.294.050.000
Jumlah	<u><u>79.025.808.368</u></u>	<u><u>25.031.271.649</u></u>
Jumlah simpanan	<u><u>84.119.592.584</u></u>	<u><u>26.912.152.155</u></u>

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar 2,50 % dan 2,50% per tahun. Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing berkisar antara 4,75% sampai dengan 6 % dan 5,25%. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.060.716.811 dan Rp 954.232.841 (Lihat Catatan 23).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

14. **SIMPANAN (Lanjutan)**

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tabungan :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	77.084.360	540.408
Pihak ketiga	5.016.694.855	1.880.340.098
Jumlah	<u>5.093.779.215</u>	<u>1.880.880.506</u>
Deposito berjangka :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	10.274.030	1.100.000.000
Pihak ketiga	79.015.534.338	23.931.271.649
Jumlah	<u>79.025.808.368</u>	<u>25.031.271.649</u>
Jumlah simpanan	<u>84.119.587.583</u>	<u>26.912.152.155</u>

15. **SIMPANAN DARI BANK LAIN**

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tabungan :		
PT BPR Indra Candra	<u>1.024.347</u>	<u>-</u>
Deposito berjangka :		
Perumda BPR Kuningan	2.000.000.000	-
PT BPR Indra Candra	1.800.000.000	1.000.000.000
PT BPR Mekar Adidana	1.500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Supra Artapersada	1.500.000.000	-
PT BPR Surya Yudhakencana	1.500.000.000	-
PT BPR Karya Guna Mandiri	1.460.000.000	1.000.000.000
PT BPR Mulya Arta	1.250.000.000	-
PT BPR Rakyat Vima	1.000.000.000	-
PT BPR majalengka	1.000.000.000	-
PT BPR Karya Prima Sentosa	1.000.000.000	-
PT BPR Tata Arhta Sadaya	800.000.000	-
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	800.000.000	-
PT BPR Artha Karya Usaha	600.000.000	-
PT BPR Amal Bhakti Sejahtera	500.000.000	-
PT BPR Chandra Muktiartha	500.000.000	-
PT BPR Catur Mas	500.000.000	500.000.000
PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	250.000.000	-
PT BPR Permata Dhanantara	200.000.000	-
PT BPR Mitra parahyangan	-	500.000.000
	<u>18.160.000.000</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah	<u>18.161.024.347</u>	<u>4.000.000.000</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

15. **SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)**

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Jangka waktu deposito berjangka antara 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan untuk tahun 2025 dan antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan untuk tahun 2024, dengan perpanjangan otomatis.

Tingkat suku bunga deposito dari bank lain sebesar 6,16 % (2025) dan 6,75 % (2024) per tahun.

16. **PERPAJAKAN**

a. **Taksiran perhitungan pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan per 31 Desember 2025 dan 2024 tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	<u>355.798.555</u>	<u>(2.390.938.979)</u>
Perbedaan waktu		
Cadangan THR	130.000.000	160.000.000
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :	<u>113.429.742</u>	<u>149.269.418</u>
Laba (rugi) neto fiscal - dipindahkan	<u>599.228.297</u> 0	<u>(2.081.669.561)</u>
Kompensasi kerugian:		
- Tahun 2021	(5.696.144.959)	(5.696.144.959)
- Tahun 2022	(6.215.206.638)	(6.215.206.638)
- Tahun 2024	(2.081.669.561)	-
Jumlah kompensasi kerugian	<u>(13.993.021.158)</u>	<u>(11.911.351.597)</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>(13.393.792.861)</u>	<u>(13.993.021.158)</u>
Taksiran Pajak penghasilan badan	<u>Nihil</u>	<u>Nihil</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025, dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

16. **PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. **Utang pajak**

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Utang Pajak Penghasilan :		
Pasal 4 ayat (2) tabungan	1.021.130	512.530
Pasal 4 ayat (2) deposito	39.684.333	24.115.972
Pasal 21	17.216.186	7.630.532
Jumlah	57.921.649	32.259.034

c. **Pajak tangguhan**

Perhitungan pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2025	2 0 2 5 Dikreditkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif	31 Desember 2025
	Rp	Rp	Rp
Aset pajak tangguhan:			
Kompensasi kerugian	1.539.232.327	(65.915.114)	1.473.317.215)

	1 Januari 2024	2 0 2 4 Dikreditkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp
Aset pajak tangguhan:			
Kompensasi kerugian	1.310.248.676	228.983.651	1.539.232.327

d. **Penghasilan (beban) pajak**

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tangguhan	(65.915.113)	228.983.651

e. **Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Penghitungan liabilitas imbalan kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat Bab 28 tentang “Imbalan Kerja,”

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) tersebut di atas besarnya Liabilitas Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto, dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan

Pada tahun 2025 BPR belum mengakui liabilitas imbalan kerja untuk 18 orang pegawai tetap dan 8 orang pegawai tidak tetap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) tersebut di atas. Suhubungan belum diakuinya kewajiban imbalan kerja maka akan berdampak pada kewajaran laporan keuangan.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
PT BPR Lingga Sejahtera	5.000.000.000	-
PT BPR Kas Indonesia	2.916.666.667	2.833.333.334
PT BPR Permata Danawira	1.465.073.234	1.232.390.393
PT BPR Indra Candra	999.897.688	1.000.000.000
PT Bank Central Asia, Tbk	86.367.883	145.982.148
PT BPR Kayrajatnika Sadaya	-	951.932.817
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	10.468.005.472	6.163.638.692
Dikurangi : Biaya provisi dan transaksi	(152.146.798)	(110.838.531)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	<u>10.315.858.674</u>	<u>6.052.800.161</u>

PT Bank Central Asia, Tbk:

Berdasarkan perjanjian kredit No. 94995709331-PK-001 tanggal 28 maret 2024, BPR memperoleh fasilitas Pembiayaan Multiguna/Investasi dari PT Bank Central Asia, Tbk, jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp 253.000.000 (duaratus limapuluh tiga juta rupiah), dengan nilai angsuran sebesar Rp 6.275.800 per bulan, dan harus diangsur dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan. Pembiayaan tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2027.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

18. **PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)**

PT BPR Kas Indonesia :

Berdasarkan perjanjian kredit No051/KMK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 BPR memperoleh fasilitas Pinjaman Modal Kerja (KMK) dari PT BPR Kas Indonesia, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 12.% per tahun, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2027.

PT BPR Permata Danawira :

Berdasarkan perjanjian kredit yang diaktakan pada notaris Ikke Srihartati, S.H. No. 46 tanggal 26 Juli 2024, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran dari PT BPR Permata Danawira, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan cicilan pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp 33.453.626,- (tigapuluh tiga juta empatratus limapuluh tiga ribu enamratus duapuluh enam rupiah) dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027.

Berdasarkan perjanjian kredit yang diaktakan pada notaris Ikke Srihartati, S.H. No. 32 tanggal 23 Desember 2024, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran dari PT BPR Permata Danawira, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus limapuluh juta rupiah), dengan cicilan pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp 11.708.769,- (sebelas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enampuluh sembilan rupiah) dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027.

Berdasarkan perjanjian kredit yang diaktakan pada notaris Ikke Srihartati, S.H. No. 32 tanggal 26 Juni 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran dari PT BPR Permata Danawira, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah), dengan cicilan pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp 25.090.219,- (dua puluh lima juta sembilan puluh dua ratus Sembilan belas rupiah) dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2028.

PT BPR Lingga Sejahtera

Berdasarkan perjanjian kredit yang diaktakan pada notaris Lia Indah Novelya, S.H., M.Kn. No. 138 tanggal 17 Desember 2025, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja *Linkage* dari PT BPR Lingga Sejahtera, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 10,000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dengan cicilan pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp 166.071.549,- (serratus enampuluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

18. **PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)**

PT BPR Lingga Sejahtera

Jaminan pinjaman yang diterima dari PT BPR Lingga Sejahtera, BPR menyerahkan jaminan berupa :

1. Daftar piutang lancar sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) atau 120% dari plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Piutang yang dijaminakan dalam kondisi lancar
 - b. Piutang yang dijaminakan tidak sedang dalam status sebagai jaminan pada bank lain
 - c. Piutang per - *enduser* yang dijaminakan, minimal telah berjalan selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Jaminan dari kredit *enduser* (point c) berupa fix asset dan atau barang bergerak.
 - e. Nilai maksimum baki debet yang diperhitungkan per – *enduser* yang dijaminakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selanjutnya diikat dengan *cassie* sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar).
2. *Cas Collateral* sebesar 10% dari nominal plafond, yang akan diikat gadai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar)

PT BPR Indra Candra :

Berdasarkan perjanjian kredit No. 5001/PK/BIC/12/2024 telah dilakukan Addendum No. AD/01/5001/PK/BIC/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2025, BPR telah menandatangani Perjanjian Kredit *Linkage* dengan PT BPR Indra Candra, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2026.

19. **LIABILITAS LAIN-LAIN**

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tunjangan hari raya	130.000.000	160.000.000
Lainnya	3.703.139	1.077.724
Jumlah	133.703.139	161.077.724

20. **MODAL SAHAM**

Berdasarkan akta notaris Lety Gayanti, S.H. No. 04 tanggal 15 Maret 2024, modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor mengalami kenaikan, dari semula modal dasar sebesar Rp20.000.000.000 (200.000 saham) pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp50.000.000.000 (500.000 saham) pada tahun 2024, serta ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp12.125.000.000 (121.250 saham) pada tahun 2023, menjadi sebesar Rp 19.125.000.000 (191.250 saham) pada tahun 2024.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

20. **MODAL SAHAM (Lanjutan)**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perekonomian Rakyat Halden Prime yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 September 2025, dan telah diaktakan pada Notaris Lety Gayanti, S.H. tanggal 6 Desember 2025, pemegang saham memberikan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas nama Tuan Hafiz Ary Nurhadi.

Susunan pemegang saham BPR pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan berdasarkan jumlah lembar saham, persentase kepemilikan, dan nilai nominal saham masing-masing pemegang saham, sebagai berikut:

Pemegang saham	Lembar saham Rp	2 0 2 5	Jumlah Rp
		Persentase kepemilikan %	
Hafidz Ary Nurhadi	199.338	99,05	19.933.800.000
Iqbal Febriano	1.912	0,95	191.200.000
Jumlah	201.250	100,00	20.125.000.000

Pemegang saham	Lembar saham Rp	2 0 2 4	Jumlah Rp
		Persentase kepemilikan %	
Hafidz Ary Nurhadi	189.338	99,00	18.933.800.000
Iqbal Febriano	1.912	1,00	191.200.000
Jumlah	191.250	100,00	19.125.000.000

21. **CADANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, Pasal 70 ayat (1) dan (3), perseroan diwajibkan untuk membentuk cadangan umum melalui penyisihan laba bersih setiap tahun sampai dengan jumlah cadangan umum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Undang-undang tersebut tidak mengatur batas waktu pemenuhan kewajiban pembentukan cadangan umum tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

22. PENDAPATAN BUNGA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Penempatan pada bank lain :		
Giro	4.813.091	10.060.441
Deposito berjangka	63.740.600	28.534.159
Tabungan	32.285.268	24.194.985
Jumlah	<u>100.838.959</u>	<u>62.789.585</u>
Kredit yang diberikan :		
Pihak ketiga bukan bank	9.470.118.833	3.976.933.547
Jumlah	<u>9.470.118.833</u>	<u>4.039.723.132</u>
Pendapatan provisi :		
Provisi kredit	12.047.851	20.910.738
Administrasi kredit	1.438.283.625	641.340.140
Jumlah	<u>11.021.289.268</u>	<u>4.701.974.010</u>

23. BEBAN BUNGA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Bunga bank lain :		
Bunga pinjaman yang diterima	693.611.827	143.764.457
Bunga simpanan dari bank lain	575.683.913	284.366.040
Bunga premi LPS	82.412.502	32.895.698
Bunga tabungan	34.477.336	42.605.706
Jumlah bunga bank lain	<u>1.386.185.578</u>	<u>503.631.901</u>
Simpanan :		
Deposito berjangka	<u>2.060.716.811</u>	<u>954.232.841</u>
Jumlah beban bunga	<u>3.446.902.389</u>	<u>1.457.864.742</u>
Biaya transaksi Kepada bank lain	<u>75.734.603</u>	<u>6.018.738</u>
Jumlah	<u>3.522.636.992</u>	<u>1.463.883.480</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Tabungan pasif	92.889.091	–
Penalti kredit	15.567.253	25.978.797
Pemulihan kerugian penurunan nilai	11.893.692	31.843.086
Administrasi tabungan	7.918.964	10.423.703
Denda pinjaman	369.320	256.566
Penalti pencairan deposito	–	28.664
Lainnya	1.397.133	1.866.172
Jumlah	<u>130.035.453</u>	<u>70.396.988</u>

25. KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	326.334.084	194.264.402
Kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	28.361.026	1.036.131
Jumlah	<u>354.695.110</u>	<u>195.300.533</u>

26. BEBAN PENYUSUTAN

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Inventaris kantor	53.565.937	36.869.420
Kendaraan	136.282.024	87.945.445
Aset tidak berwujud	9.999.996	1.354.174
Jumlah	<u>199.847.957</u>	<u>126.169.039</u>

27. BEBAN PEMASARAN

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Sovenir deposito	1.960.000	1.759.000
Iklan dan promosi	–	954.400
Jumlah	<u>1.960.000</u>	<u>2.713.400</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

28. BEBAN TENAGA KERJA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Gaji dan tunjangan	2.990.933.396	2.996.861.898
Honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris	240.574.445	214.300.000
THR	223.758.842	229.955.937
Pendidikan dan pelatihan	70.696.461	124.095.223
Lainnya	299.808.620	398.262.176
Jumlah	<u>3.825.771.764</u>	<u>3.963.475.234</u>

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Jasa pihak ke III	1.136.651.457	522.504.416
Jasa <i>marketing</i>	1.096.103.905	384.562.035
Sewa	249.533.071	197.578.504
Pemeliharaan dan perbaikan	115.612.986	65.533.507
Keperluan kantor	79.247.003	67.909.936
Pungutan OJK	24.911.175	-
Administrasi bank	18.793.119	9.933.983
Pajak	14.683.746	73.907.138
Premi asuransi	8.691.691	8.695.071
Jumlah	<u>2.744.238.153</u>	<u>1.330.624.590</u>

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 5 Rp	2 0 2 4 Rp
Penjualan aset tetap	36.062.500	8.690.000
Pendapatan komisi asuransi	5.275.477	-
Sumbangan sosial	(51.395.001)	(37.146.400)
Aktivitas karyawan	(38.824.261)	-
Jamuan Tamu	(18.974.300)	(23.112.400)
Iuran OJK	(3.660.000)	(7.960.873)
Seragam Dinas	(444.800)	(500.000)
Lainnya	(74.415.816)	(20.514.029)
Iuran retribusi lingkungan	-	(600.000)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional - bersih	<u>(146.376.201)</u>	<u>(81.143.702)</u>

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

32. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 5	2 0 2 4
	Rp	Rp
Komitmen:		
Bunga kredit yang diberikan	229.216.981	–
Bunga penempatan pada bank lain	2.625.001	–
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan Bunga Kredit Dalam Penyelesaian	–	50.505.937

33. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tersebut meliputi :

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat dari transaksi
Iqbal Febriano	Komisaris Utama	Kredit dan Tabungan
Faizal Sanusi	Komisaris	Kredit
Indriyanti Sukmadijaya	Direktur Utama	Kredit Deposito dan Tabungan
Fitra Ramdani	Direktur Bisnis	Kredit Deposito dan Tabungan
Hafiz Ary Nurhadi	Pemegang saham	Tabungan
Gempur Aria Nugraha	Divisi Kredit	Tabungan
Nieke Ratna Manikam	Pejabat eksekutif	Tabungan
Farid Komarudin	Direktur Operasional	Tabungan

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 435.621.732 dan Rp 235.191.667.
- b. Penempatan dana dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito berjangka. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 simpanan Tabungan masing-masing sebesar Rp 71.830.359 dan Rp 540.408 sedangkan simpanan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp 10.274.030 dan Rp 1.100.000.000 (lihat Catatan 14).

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Program Penjaminan Simpanan, simpanan yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta mencakup simpanan yang berasal dari bank lain.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (Lanjutan)

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Program Penjaminan Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank maksimum Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan simpanan yang layak dibayar yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perekonomian Rakyat periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026 adalah sebesar 6,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 82.412.502 dan Rp 32.895.698 (lihat Catatan 23).

35. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 12%. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar 20,38% dan 30,43 %

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

	2025
	Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)	
1. Kas	-
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-
3. Kredit dgn agunan likuid	-
4. AYDA 1 tahun atau lebih	-
5. Kredit dengan agunan emas	-
6. Penempatan dgn bank lain	2.671.158.334
7. Kredit dgn penjamin bank/pemda	-
8. Kredit dgn penjamin BUMN/D ~ Tanpa syarat	-
9. Kredit dgn agunan tanah/bangunan (APHT)	5.054.849.287
10. Kredit dgn penjamin BUMN/D ~ Pakai syarat	555.439.196
11. Kredit kpd pegawai/pensiunan	10.409.003.675
12. Kredit dgn jaminan tanah/bangunan (SKM)	2.701.783.333
13. Kredit kpd Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-
14. Kredit dgn agunan Fidusia	2.109.042.270
15. Kredit lainnya	10.501.172.013
16. Kredit sudah jatuh tempo atau macet	1.025.039.844
17. Aktiva Tetap dan Inventaris	1.099.947.555
18. AYDA kurang dari 1 tahun	-
19. PPAP Umum (-/-)	-
20. PPAP Khusus (-/-)	-
21. Aset lainnya : PYAD	1.856.313.989
22. Aset lainnya : Lain-lain	4.088.051.295
Jumlah	42.071.800.789

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

2024
Rp

I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

1. ASET NERACA

1.1. Kas	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	1.509.993.825
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	4.222.687.597
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	1.795.488.941
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	1.831.972.687
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	1.035.002.778
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	354.847.410
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	929.537.293
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	9.916.099.036
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	-
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	902.573.692
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	685.361.197

Jumlah ATMR

23.183.564.455

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

35. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2025 Rp	2024 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	20.125.000.000	19.125.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	-	-
1.1.2.1. Agio	-	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	-	-
1.1.2.3. Modal sumbangan	-	-
1.1.2.4. Cadangan umum	300.000.000	300.000.000
1.1.2.5. Cadangan tujuan	-	-
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.1.2.7. Rugi tahun-tahun lalu	(12.377.594.255)	(9.979.350.390)
1.1.2.8. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (50%)	289.883.437	(2.390.938.979)
1.1.2.9. Rugi tahun berjalan	-	-
1.1.2.10. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	-	-
1.1.2.11. <i>Goodwill</i>	-	-
1.1.2.12. Disagio	-	-
1.1.2.13. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1(satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	-	-
Jumlah modal inti utama	<u>8.337.289.182</u>	<u>7.054.710.631</u>
1.2 Modal Inti Tambahan	-	-
1.3 Modal Inti Tambahan	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-	-
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	233.947.860	193.660.859
umlah modal pelengkap	<u>233.947.860</u>	<u>193.660.859</u>
Jumlah modal	<u>8.571.237.043</u>	<u>7.248.371.490</u>
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	5.048.616.095	2.782.027.735
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	3.522.620.948	4.466.343.755
IV. Rasio Modal (CAR)		
(Jumlah modal / ATMR) x 100%	20,53%	31,27%
Persentase Modal Inti terhadap ATMR	19,97%	30,43%
V. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah modal	857.123.704	724.837.149
Pihak ketiga : 20% x Jumlah modal	1.714.247.409	1.449.674.298
Kelompok: : 30% x Jumlah modal	2.571.371.113	2.174.511.447

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

36. **INFORMASI LAINNYA**

	2025 %	2024 %
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	20,37	30,43
Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	296,40	1.252,83
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	1,75	1,31
<i>Non Performing Loan</i>	2,80	1,59
Pemenuhan PPAP	100,00	100,38
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	0,58	(8,26)
<i>Return On Equity (ROE)</i>	4,80	(41,86)
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	95,50	148,40)
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Rasio (LDR)</i>	120,44	131,47
<i>Cash Rasio</i>	6,84	20,86

37. **MANAJEMEN RISIKO**

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas Perekonomian, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

37. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aktiva dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan (Catatan 14) adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu Perekonomian (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional bank secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direksi.
5. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK dan memberikan **Early Warning** kepada Direksi dimana terdapat kondisi telah mendekati limit BMPK.
6. Melakukan mitigasi risiko kredit dengan pihak asuransi.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

37. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai berikut :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Risiko reputasi BPR dapat ditimbulkan akibat pengaruh dari kejadian reputasi pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak yang berasosiasi dengan BPR. BPR juga harus memerhatikan frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah. Selain itu, mitra bisnis juga dapat berperan dalam meningkatkan Risiko Reputasi BPR. Kerja sama yang dilakukan BPR dengan mitra bisnis yang sedang mengalami gangguan reputasi dapat berdampak pada kegiatan operasional BPR, terutama jika mitra bisnis dimaksud mendukung kegiatan operasional BPR antara lain penyedia jasa teknologi informasi yang secara berkesinambungan mengoperasikan aplikasi inti perbankan BPR.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Manajemen risiko atas strategik yang dijalankan oleh BPR dengan cara melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko strategik dan penetapan limit paling lambat semester I Tahun 2025.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

39. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal wajib diterapkan secara efektif dengan memperhatikan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang sedikitnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia.

BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang telah disusun secara individual untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini melalui system elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

42. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit yang Diberikan :

1. Perjanjian Kerjasama dengan PT Cipta Teknologi Aplikasi

Pada tanggal 20 Juli 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 001/BPR-DUPAS/PKS/VII/2023 dengan PT Cipta Teknologi Aplikasi (PIHAK KEDUA).

2. Perjanjian Kerjasama dengan PT Supernova Palapa Nusantara

Pada tanggal 25 Juli 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 003/BPR-DUPAS/PKS/VII/2023 dengan PT Supernova Palapa Nusantara (PIHAK KEDUA).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

42. **PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit yang Diberikan (Lanjutan) :

3. Perjanjian Kerjasama dengan PT Cipta Sandy Sanjaya

Pada tanggal 21 Agustus 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 004/BPR-DUPAS/PKS/VIII/2023 dengan PT Cipta Sandy Sanjaya (PIHAK KEDUA).

4. Perjanjian Kerjasama dengan CV. Sahabat Abadi Vannamei

Pada tanggal 28 Agustus 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 006/BPR-DUPAS/PKS/VIII/2023 dengan CV. Sahabat Abadi Vannamei (PIHAK KEDUA).

5. Perjanjian Kerjasama dengan CV. Kevlin

Pada tanggal 2 Oktober 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 006/BPR-DUPAS/PKS/X/2023 dengan CV. Kevlin (PIHAK KEDUA).

6. Perjanjian Kerjasama dengan PT Mustika Pamarti Nagri

Pada tanggal 11 Oktober 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 007/BPR-DUPAS/PKS/X/2023 dengan PT Mustika Pamarti Nagri (PIHAK KEDUA).

7. Perjanjian Kerjasama dengan PT Amari Global Kaharsa

Pada tanggal 11 November 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 008/BPR-DUPAS/PKS/XI/2023 dengan PT Amari Global Kaharsa (PIHAK KEDUA).

8. Perjanjian Kerjasama dengan PT Alqosbah Karya Indonesia

Pada tanggal 12 Desember 2023, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan (PIHAK KESATU) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 014/BPR-DUPAS/PKS/XII/2023 dengan PT Alqosbah Karya Indonesia (PIHAK KEDUA).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

42. **PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit yang Diberikan (Lanjutan) :

8. Perjanjian Kerjasama dengan PT Alqosbah Karya Indonesia (Lanjutan)

Perjanjian Kerjasama penyaluran kredit di atas (No. 1-8) tersebut diantaranya berisi sebagai berikut :

Ruang Lingkup

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penyaluran fasilitas kredit oleh PIHAK PERTAMA kepada (para) Calon Penerima Kredit.
- b. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran gaji dan/atau penghasilan selain gaji yang diterima Penerima Kredit sebagai Pegawai PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berturut-turut untuk pembayaran angsuran kredit kepada PIHAK PERTAMA sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.

Persyaratan Penerima Kredit

- a. Sebelum mengajukan permohonan kredit kepada PIHAK PERTAMA, Calon Penerima Kredit harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- b. PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh masing-masing Calon Penerima Kredit dan keputusan pemberian kredit sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa keputusan pemberian kredit untuk tiap-tiap permohonan kredit yang diajukan Calon Penerima Kredit kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya berada di tangan PIHAK PERTAMA.

Pemberitahuan Penerima Kredit Meninggal

- a. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terdapat penerima kredit yang meninggal dunia. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerima kredit meninggal dunia.
- b. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada pihak keluarga / ahli waris dari penerima kredit yang meninggal dunia tersebut, untuk segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA perihal meninggal dunianya penerima kredit serta menyerahkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan klaim Asuransi Jiwa selambat-lambatnya 7 hari kerja.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

42. **PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit yang Diberikan (Lanjutan) :

8. Perjanjian Kerjasama dengan PT Alqosbah Karya Indonesia (Lanjutan)

Bantuan PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam penyelesaian kewajiban keuangan (para) Penerima Kredit Sampai seluruh kewajiban tersebut dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA dalam hal (para) Penerima Kredit dimaksud mutasi/pindah kantor, diberhentikan sebagai Pegawai, pensiun dini, atau karena sebab apapun yang dapat menghambat kelancaran pembayaran kewajiban/angsuran kredit.
- b. PIHAK KEDUA dengan ini memastikan bahwa tagihan/permintaan pemotongan gaji yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA akan lebih diutamakan (preferensi).

Perjanjian Sewa Menyewa

Gedung kantor Kopo

Pada tanggal 21 Februari 2022 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Duta Pasundan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margahayu, Desa Margahayu Selatan. Setempat dikenal sebagai Blok Bojong Pacing (sekarang Jalan Terusan Kopo Nomor 456 D).

Sewa menyewa ini diadakan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan akta notaris Yohana Menggala, S.H. no 11 tanggal 17 Februari 2025, telah ditandatangani perpanjangan perjanjian sewa menyewa Sebidang tanah berikut bangunan untuk masa sewa 1 (satu) tahun dengan nilai sewa yang disepakati sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) per tahun. Jangka waktu sewa mulai tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2026, kemudian diperpanjang kembali sampai dengan 20 Mei 2026 dengan tambahan nilai sewa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga nilai sewa keseluruhan sebesar Rp 98.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Gedung Kantor Buah Batu

Berdasarkan akta notaris Desiyana Chafsah, S.H. no 14 tanggal 4 Agustus 2025, telah ditandatangani perjanjian sewa menyewa Sebidang tanah dan bangunan beserta segala turutannya yang berdiri di atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2014/Kelurahan Turangga, Nomor 196/1959, seluas 311 m yang terletak di kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Buah Batu No 105 Bandung. Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun dimulai pada tanggal 4 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2030.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HALDEN PRIME
(d/h PT BPR BANK DUTA PASUNDAN)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025

42. **PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**

Perjanjian Sewa Menyewa (Lanjutkan)

Gedung Kantor Buah Batu (Lanjutan)

Renovasi terhadap sewa diatur sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan Pihak Pertama (Hj. Entang Roswati), Pihak Kedua (BPR) untuk melakukan penyempurnaan (renovasi) terhadap obyek sewa termasuk namun tidak terbatas untuk memasang praktisi, penambahan ruangan penyimpanan uang dan dokumen asli, plafond, sanitair, menambah saluran telepon, air, peningkatan daya Listrik, penambahan instalasi Listrik, memasang nama (logo/lettering) dan menambah fasilitas lain sesuai kebutuhan Pihak Kedua.
- b. Segala biaya yang timbul akibat perubahan atau penambahan (renovasi) sebagaimana di atas merupakan tanggungan Pihak Kedua.
- c. Semua perubahan atau penambahan menjadi milik Pihak Pertama tanpa penggantian berupa apapun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada waktu perjanjian sewa berakhir, kecuali untuk barang-barang/ benda/perlengkapan/inventaris.

Biaya sewa dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pertahun untuk 2(dua) tahun pertama
- b. Sebesar Rp308.000.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) pertahun untuk 2(dua) tahun berikutnya.
- c. Sebesar Rp323.400.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pertahun untuk 1(satu) tahun berikutnya.
- d. Uang deposit sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang mungkin dialami oleh Pihak Pertama atas obyek (apabila ada).

43. **TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Pengurus Perusahaan pada tanggal 27 April 2026.